

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan zaman dan dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), banyak masalah-masalah keagamaan yang dahulu tidak ada kini bermunculan masalah-masalah baru terutama pada *masalah mu`amalah*, seperti jual beli cacing.

Cacing yang dahulu dianggap menjijikkan oleh masyarakat, pada saat ini naik derajatnya menjadi hewan yang multimamfaat, antara lain sebagai penyubur tanaman, pakan ternak, pakan ikan hias, sebagai bahan untuk obat, kosmetik dan pengolah limbah. Pada saat ini mamfaat cacing makin ditingkatkan kearah komersial dan finansial, sebagai salah satu cabang usaha yang menguntungkan.

Dalam surat keputusan fatwa MUI, mengenai budidaya cacing dan jangkrik dijelaskan bahwa membudidayakan cacing untuk diambil sendiri mamfaatnya, untuk pakan ternak misalnya, **tidak untuk dimakan atau dijual** hukumnyaboleh. Dari keputusan tersebut dapat penyusun simpulkan bahwa MUI membolehkan budidaya cacing sedangkan untuk diperjualbelikan tidak boleh, padahal antara budidaya dan jual beli memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena dalam budidaya pastilah ada proses jual belinya, karena dengan membudidaya pasti membutuhkan dana.

Pendekatan yang dilakukan dalam menganalisis permasalahan ini adalah *ushul fiqh*, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan teori-teori atau kaedah-kaedah dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum dalam Islam karena dalam hal hukum jual beli cacing ini tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur`an maupun as-Sunnah.

Dari hasil penelitian, alasan MUI membolehkan budidaya cacing adalah dengan memperhatikan makalah “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh” dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu kaidah *al-aslu fi al manafi` al-ibahah*, *masalah mursalah*, dan *maqosid syari`ah*. Dan alasan MUI mengharamkan jual beli cacing juga dengan memperhatikan makalah yang sama, dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan jual beli cacing juga dengan memperhatikan makalah yang sama, dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan binatang *al-hasyarat*.

Di lain pihak, sebenarnya MUI tidak mengharamkan jual beli cacing, tetapi mengakui dua pendapat yaitu menghalalkan dan mengharamkan. Adapun metode istinbat yang digunakan MUI untuk menghalalkan jual beli cacing dengan menggunakan metode *istislah/maslahah mursalah*, dan metode istinbat yang digunakan MUI untuk mengharamkan jual beli cacing adalah dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan memakan binatang *al-hasyarat* dan juga menggunakan metode *qiyas*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga dengan beberapa rintangan, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan juga melimpah kepada umat Islam seluruhnya.

Untuk memenuhi amanah studi skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak, baik moril maupun materil hingga selesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Herman dan Ibunda Tasmawati tercinta yang telah banyak memberikan dorongan baik materil maupun moril selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim, MA. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memimpin UIN dengan sangat baik sehingga segala urusan di setiap fakultas maupun jurusan dapat berjalan lancar.
3. Dr. H Akbarizan MA, MP.d Sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Kamiruddin, M. Ag. Sebagai Ketua Jurusan Muamalah, yang telah banyak berperan aktif baik dalam penulisan skripsi ini secara khusus, selama masa perkuliahan umumnya.
5. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M. Pd selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya dan berupaya keras mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan ilmu dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Seluruh keluargaku tercinta Ayahanda Herman Ibunda Tasmawati Adik-adikku, Anta Kurniawan, Anggun Biranda, dan Afry Setiawan, yang telah melimpahkan perhatian, kasih sayang, nasehat, bimbingan dan dorongan baik bersifat materil maupun moril selama penulis kuliah UIN SUSKA Riau.
8. Khusus untuk Adik-Adikku, ayo tetap semangat untuk menggapai cita-cita yang kalian inginkan agar kita bisa memberikan mamfaat untuk Nusa, Bangsa serta Agama.

9. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Dan terimakasih banyak juga atas dukungan dan motivasinya teristimewa buat Yayangku Nikhe Junita.

Terima kasih atas bantuan, kebaikan dan keiklasan dorongan serta apapun yang telah diberikan kepada penulis semuanya pasti ada alasan dan mamfaatnya untuk penulis. Penulis tidak bisa membalas semua itu karena cukup banyak sumbangsinya, penulis hanya bisa berharap dalam sebuah untaian doa, mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang setimpal akan kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sudah memaksimalkan kempuan yang penulis miliki, sungguhpun demikian sebagai seorang manusia biasa yang tak luput dari salah dan mempunyai keterbatasan, sehingga akan banyak terdapat kekurangan dari berbagai sudut dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, penulis berharap ada kritikan dan saran dari para pembaca yang tentunya untuk membangun serta untuk perbaikan kedepannya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bisa memberikan mamfaat serta dapat juga untuk digunakan, khususnya untuk penulis, dan pembaca pada umumnya. Amin,,,

Pekanbaru, September 2013
Penulis,

FIKI LEOTA INDRA
NIM : 10822001852

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sumber Data	10
3. Metode Pengumpulan Data	11
4. Metode Analisa Data	11
5. Metode Penulisan	12
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI CACING	
A. Jual Beli	14
1. Defenisi	14
2. Dasar Hukum	16
3. Rukun dan Syarat-Syarat	19
4. Macam-Macam.....	25
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	26
B. Cacing	29
1. Kalsifikasi Cacing	29
2. Jenis-Jenis Cacing Tanah	34
3. Ciri-Ciri Fisik Cacing Tanah	37

4. Mamfaat Cacing	38
5. Jual Beli Cacing	43
BAB III MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWANYA TENTANG	
JUAL BELI CACING	
A. Sejarah MUI	48
B. Komisi Fatwa	54
C. Pandangan dan Metode Istibat MUI Mengenai Hukum Jual Beli Cacing	57
1. Pandangan MUI Mengenai Hukum Jual Beli Cacing	57
2. Metode Istibat Mengenai Hukum Jual Beli Cacing	59
BAB IV ANALISA TERHADAP PANDANAGAN DAN METODE	
ISTINBAT MUI MENGENAI HUKUM JUAL BELI CACING	
A. Terhadap Pandangan MUI Mengenai Hukum Jual Beli Cacing	63
1. Alasan MUI Membolehkan Budidaya Cacing	63
2. Alasan MUI Mengharamkan Jual Beli Cacing	69
3. Terhadap Pandangan MUI Mengenai Hukum Budidaya Cacing dan Jual Beli Cacing	70
B. Terhadap Metode Istibat MUI Mengenai Hukum Jual Beli Cacing	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	

ANALISIS FATWA MUI NOMOR: Kep-139/MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI CACING

A. Latar Belakang Masalah

Kajian fiqh dari zaman ke zaman berubah dan berkembang termasuk dalam hal mu`amalat, seperti jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjual belikan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. Sehingga hukum muamalat pun harus bisa fleksibel mengikuti situasi dan kondisi.

Contoh dari perkembangannya jual beli dari segi harganya adalah jual beli cacing tanah yang sempat menjadi wacana pada tahun 1999. Pada saat itu banyak anggota masyarakat yang membudidayakan cacing tanah untuk digunakan sebagai bahan obat-obatan, kosmetik, pakan ternak dan lain-lain.

Satu sisi cacing tanah yang tergolong kelompok binatang *avertebrata* (tidak bertulang belakang) dengan seluruh tubuhnya yang tersusun atas segmen-segmen, merupakan binatang yang menjijikkan bagi sebagian besar masyarakat, tetapi pada sisi lain cacing tanah merupakan binatang yang mempunyai multimamfaat, antara lain untuk obat-obatan, kosmetik, pakan ternak, dan pengurai limbah organik yang dapat menghasilkan pupuk organik yang sangat berguna dalam bidang pertanian.¹

¹ Rony Palungkun, *Sukses Beternak Cacing Tanah Lumbricus*, cet. Ke- 5 (Jakarta: Penebar Swadaya, 1999). h. 2

Menurut Ir. Rahmat Rukmana, potensi multi mamfaat cacing tanah ini sekarang makin ditingkatkan kearah komersial dan finansial sebagai salah satu cabang usaha yang menguntungkan. Dengan demikian mamfaat dari jual beli cacing tanah dapat membuka lapangan pekerjaan dan sebagai mata pencarian bagi masyarakat baik yang bersifat primer, skunder, maupun tersier dalam melestarikan kebutuhan hidupnya guna memelihara lima unsur pokok yang menjadi tujuan hidup, yaitu memelihara kehormatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Demikian pula buku, *Budidaya Cacing Tanah*² yang ditulis oleh rahmat rukmana. Buku ini menjelaskan tentang multimamfaat cacing dan cara membudidayakan cacing. Disamping itu ada pula buku “Sukses Berternak Cacing Tanah *Lumbricus Rubellus*”,³ yang ditulis oleh Rony Palungkun. Buku ini menjelaskan bagaimana prospek usaha caing *Lumbricus Rubellus*, mamfaat dari cacing *Lumbricus Rubellus*, dan cara membudidayakan cacing *Lumbricus Rubellus*.

Dalam buku *Zoology Dasar* karya Djarubito Widjoyo, menjelaskan mengenai anatomi binatang-binatang, termasuk cacing yang termasuk keddalam *Phylum Annelida*.⁴

Dalam artikel harian KOMPAS, tanggal 7 April 2013 dengan judul “Cacing Tanah Mengolah Lingkungan Yang Tercemar”, dibahas mengenai mamfaat cacing tanah, dimana tidak hanya untuk daur ulang bahan-bahan

² Rahmat Rukmana, *Budidaya Cacing Tanah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisisus, 2003), h. 9

³ Rony Palungkun, *Sukses Berternak Cacing Tanah Lumbricus Rubellus*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 1999).

⁴ Mukayat Djarubito Brotowidjoyo, *Zoology Dasar*, cet. Ke 3 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994)

organik, tetapi juga dapat mendaur ulang bahan-bahan organik, seperti limbah-limbah logam dan non logam yang beracun.⁵

Pada artikel yang sama dengan judul “Atasi Polusi dengan Biaya Murah” membahas mengenai mamfaat cacing tanah sebagai pengolah limbah pertanian, dan peternakan. Di Amerika terdapat perusahaan yang khusus menjual cacing tanah untuk berbagai keperluan seperti penyuburlahan pertanian sampai ke pengurai sampah organik baik dari pertanian maupun ternak.⁶

Dalam internet dengan website [http// www. Iptek. net. id/ budidaya peternakan. php](http://www.Iptek.net.id/budidaya-peternakan.php). terdapat artikel yang berjudul “budidaya Peternakan Budidaya Cacing Tanah (*Lumbricus sp*),” dalam artikel ini dijelaskan dari sejarah (*phylum, kelas dan famili cacing tanah lumbricus sp*), mamfaat, cara pembudidayaan, panen dan analisis terhadap keuntungan yang didapat dari budidaya cacing tanah ini.⁷

Dalam hukum muamalah khususnya jual beli juga mengalami perkembangan,dimana hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah/ boleh bisa berubah menjadi haram jika tidak sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan oleh syara`.

⁵ Nurachman Zeily, “Cacing Tanah Mengolah Lingkungan Yang Tercemar”, Harian Kompas, 7 April 2012

⁶ “Atasi Polusi dengan Biaya Murah”, Harian Kompas, 7 April 2012

⁷ “Budidaya Peternakan Budidaya Cacing Tanah (*Lumbricus sp*)”, <http://www.iptek.net.id/budidyapeternakan.Php>. diakses 22 mei 2012

Dalam bermuamalah terdapat perinsip-perinsip mu`amalah sebagai berikut :⁸

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur`an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan mamfaat dan menghindari mudhorot dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara dengan nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Adapun syarat-syarat barang yang diperjualbelikan menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah:⁹

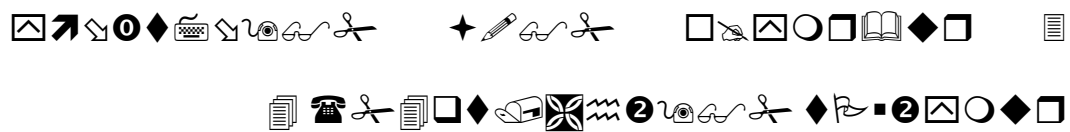
1. Barangnya suci, maka tidak sah berupa sesuatu yang najis, baik barang maupun harganya.
2. Dapat dimanfaatkan secara syara`. Maka tidak sah menjual serangga yang tidak ada mamfaatnya.
3. Barang yang dijual milik penjual ketika dijual. Maka tidak sah menjual yang bukan miliknya, kecuali dalam jual saham.
4. Dapat diserahkan terimakan, maka tidak sah menjual barang yang dirampas orang lain.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu`amalat, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Perss, 2000), cet. Ke-2, h. 15

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Terjemahan Fiqh Empat Mazhab*, ahli bahasa oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (ttp : Darul Ulum Press, 2001), h. 148-149

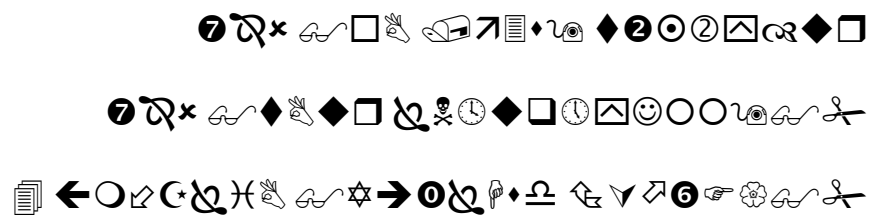
5. Barang dan harganya diketahui jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan.
6. Akadnya tidak dibatasi waktu.

Dasar hukum dari barang yang diperjualbelikan antara lain yaitu firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 275 tentang kehalalan jual beli:



“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli itu diperbolehkan selama berada dalam ketentuan syara` begitu juga mengenai ma`qud `alaihnya. Demikian juga akan halnya cacing tanah pada saat sekarang banyak dibudidayakan sebagai pakan ternak, kosmetik, obat-obatan dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa cacing tanah memiliki mamfaat dalam kehidupan manusia sehingga dapat diperjualbelikan. Sebagai mana firman Allah SWT surat al-Jasiyah (25): 13



“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.”

Menurut Ibn al-Qayyim al-jauziyyah dalam kitab *I'lamulMuwaqin* bahwa sabda Rasulullah mengenai barang najis itu haram (seperti hadis diatas terdapat dua pendapat yaitu:

1. Bahwa semua perbuatan itu haram
2. Bahwa menjualbelikannya haram, sekalipun si pembeli menggunakannya untuk kepentingan yang sama.¹⁰

Madzhab Hanafi dan Mazdhab Zahiri mengecualikan barang yang ada mamfaatnya, mereka memandang halal untuk dijualbelikan seperti dibolehkannya seorang menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis untuk digunakan sebagai pupuk tanaman.¹¹

Dalam hukum islam masalah jual beli telah ditetapkan aturan hukum dalam nas-nas al-Qur`an, Hadist, dan pendapat-pendapat (ijtihad) para ulama dan pengikutnya. Dalam masalah jual beli cacing para ulama mazhab tidak membahas secara spesifik, para ulama madzhab hanya menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli baik mengenai orang yang berakad, orang yang diakadkan maupun akad itu sendiri (sigah).

Jual beli cacing merupakan hal yang baru, yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur`an maupun as-Sunnah. Oleh karena itu dalam menentukan hukumnya memerlukan ijtihad. Dari segi teknik ijtihad terbagi kepada 3 bagian yaitu¹², *Pertama Ijtihad Bayani* yaitu ijtihad yang berhubungan

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath Lil I'lam al-`araby, 1410H/1990M), III:202-203

¹¹ *Ibid.*

¹² Jaih Mubarak, *Metedologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Perss, 2002), Cet ke-1, h.8

dengan penjelasan kebahasaan yang terdapat di al-Qur`an dan as-Sunnah, Ijtihad ini cenderung dipandang sama dengan tafsir. Ijtihad ini terbagi 3 bagian yaitu:

1. Ijtihad yang berhubungan dengan cakupan makna lafaz,
2. Ijtihad yang berhubungan penggunaan lafaz, dan
3. Ijtihad yang berhubungan dengan cara penunjukan lafaz terhadap makna (*dilalat*).

Ijtihad *Qiyasi* atau disebut pula dengan ijtihad *ra`y* yaitu ijtihad untuk menyelesaikan suatu sengketa atau persoalan yang dalam al-Qur`an dan as-Sunnah tidak ada ketentuan hukumnya, dan ulama menyelesaikannya dengan cara *qiyas* atau *istihsan*. Dalam ijtihad ini terdapat rukun yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Adanya pokok (*al-asl* atau *maqis`alai*) yaitu persoalan-persoalan yang telah disebut dalam nash
2. Adanya cabang (*al-far`u* atau *al-maqis*) yaitu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok (*al-asl*)
3. Adanya hukum (*al-Hukm*) yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama dengan cabang, dan
4. Adanya `illat (*al-`illat*) yaitu sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar persyari`atan hukum.¹³ Dan ijtihad

¹³ Romil SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999), cet.ke-1, h.103-104

istislahy yaitu ijtihad yang menggunakan *ra`y* yang tidak menggunakan ayat-ayat al-Qur`an dan hadis secara umum.

Mengenai hal ini sebagian umat islam mempertanyakan hukum jual beli dari segi cara, bentuk, model maupun barang nya. Dari segi barang pada saat sekarang banyak jual beli yang tidak didapati hukumnya dalam al-Qur`an maupun dalam al-Hadis sehingga dibutuhkan pengkajian lebih terhadap hukum-hukum. Berkenaan persoalan baru yang belum ada ketentuan hukumnya, maka untuk memperoleh kepastian hukum tentunya tidak lepas dari peran para ulama Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI memutuskan melalui fatwanya bahwa cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori *al- hasyarat*¹⁴ dengan pertimbangan membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-auza`i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermamfaat dan tidak membahayakan. Begitu juga pendapat ulama yang mengharamkan memakannya, MUI juga menghalalkan membudidayakan cacing untuk diambil mamfaatnya, selama tidak untuk dimakan maka tidak bertantangan dengan hukum islam, dan membudidayakan cacing untuk diambil sendiri mamfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya Mubah (boleh).¹⁵

¹⁴ Yang dimaksud dengan *al- hasyarat* dalam kamus bahasa arab adalah binatang-binatang kecil atau serangga, menurut Ahmad Munif, mengutip dari kamus-kamus bahasa arab *al- hasyarat* ada dua macam ada mempunyai sayap yang bisa terbang dan ada juga yang tidak bersayap (melata). Lihat Ahmad Munif, "Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam kajian fiqh" makalah disampaikan pada sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 11 dan 25 September 1999. h. 6

¹⁵ Ma`ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 635

Dari keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa MUI membolehkan budidaya cacing selama tidak menimbulkan mudharat dan tidak boleh untuk dimakan atau diperjual belikan.

B. Batasan Masalah

Mengingat terbatasnya waktu, kemampuan dan biaya yang dimiliki, dan mengingat agar pembahasan ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi hanya pada Analisis Fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing.

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa MUI membolehkan budidaya cacing sedangkan untuk diperjual belikan tidak boleh?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan MUI dalam melarang jual beli cacing?

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan keputusan fatwa MUI mengenai bolehnya budidaya cacing dan dilarangnya jual beli cacing.
2. Mendiskripsikan metode istinbat, hukum yang digunakan MUI dalam melarang jual beli cacing.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah khasanah keilmuan islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah muamalah
2. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai alasan MUI melarang jual beli cacing.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau yang sering dikenal dengan sebutan *Library research* yakni kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab, majalah, artikel maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan, sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber data primer berasal dari Fatwa MUI tentang makan dan budidaya cacing dan jangkrik.

b. Sumber data skunder berasal dari makalah budidaya cacing dan jangkrik dalam kajian fiqh, sukses beternak cacing *Lumbricus Rubellus*, budidaya cacing tanah, fiqh islam *wa adillatuhu*, terjemahan fiqh empat mazhab, terjemahan kifayatul akhyar, ushul fiqh, ilmu ushul fiqh dan terjemahan bulughul maram, serta tulisan-tulisan lain baik itu berupa artikel maupun website dan wawancara dengan pihak MUI.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumberdata berasal dari literatur perpustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisa data kualitatif dengan metode induktif yaitu dengan mengkaji fatwa MUI mengenai budidaya cacing dan jangkrik yang membolehkan budidaya cacing dan mengharamkan jual beli cacing dan kemudian mendeskripsikan metode istimbat yang digunakan MUI, sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat dalam pokok masalah.

5. Metode Penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi terarah dan teratur maka sistematika pembahasan yang dibuat dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, untuk mengarahkan pembaca kepada isi penelitian ini.

Bab kedua, mengantarkan kepada permasalahan mengenai jual beli cacing, maka pada bab ini menjelaskan mengenai teori mengenai gambaran jual beli secara umum, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai cacing secara umum, yang meliputi klasifikasi cacing, jenis-jenis cacing, ciri-ciri fisik cacing tanah dan manfaat cacing, dan pada sub terakhir dijelaskan mengenai jual beli cacing.

Bab ketiga, karena penelitian ini mengenai hukum jual beli cacing dalam perspektif MUI, maka pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah MUI, komisi fatwa MUI, fatwa MUI mengenai hukum jual beli cacing dan metode istinbat yang dilakukan oleh MUI dalam hal jual beli cacing.

Bab keempat, pada bab ini menganalisis mengenai fatwa MUI mengenai hukum jual beli cacing dan metode istinbat MUI mengenai hukum jual beli cacing.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI CACING

A. Jual Beli

1. Defenisi.

Menurut bahasa menjual berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Satu diantara dua harta yang saling diterima disebut *mabi`* (barang yang dijual), sedang yang lain disebut *saman* (harga).¹

Jual beli dalam fiqh islam disebut dengan *Al-bai`*. Lafaz *Al-bai`* berasal dari bahasa arab. *Al-bai`* merupakan bentuk masdar dari kata *ba`a*, *yabi`u* yang berarti membeli. Dalam pemakaian lafaz *al-bai`* terkadang digunakan untuk pengertian lawan katanya, yaitu kata *as-sira*, oleh karena itu *al-bai* bukan hanya berarti menjual tetapi juga mempunyai arti membeli.²

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang

¹Abdurrahman al-Jaziri, *Terjemahan Fiqh Empat Mazhab*, ahli bahasa oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (ttp : Darul Ulum Press, 2001), h. 134.

² Ahmad Warson al- Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan P.P al-munawwir, 1994), h. 134 dan 766.

menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.³

Para fuqahq menyampaikan pengertian yang berbeda-beda mengenai jual beli secara istilah, antara lain sebagai berikut:

Menurut Imam Taqiy ad-Din jual beli adalah

مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول علي الوجه الماذون فيه

“Pertukaran harta dengan harta antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dimana serah terimanya menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang telah ditetapkan oleh syara’”⁴

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu`aatha* (tanpa ijab-qabul).⁵

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang punyai tujuan kepemilikan antara satu orang dengan yang lain yang disertai dengan ijab dan penyerahan, dan disertai dengan kerelaan dua belah pihak.

³ Peter Salim dan Yunni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modren English Press, 1991), h. 626.

⁴ M. Rifa'i, dkk, *Kif' yah al-Akhy r*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 183.

⁵ Wahbah a-Zubaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Dar ul-Fikir, 2011), Jilid V, h. 25.

2. Dasar Hukum.

Hukum asal dari jual beli adalah mubah, tetapi hukum asal ini bisa berubah menjadi wajib ketika dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, dan bisa menjadi haram ketika menahan menjual sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang lain, bisa juga menjadi sunat, jika seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan diri dan orang lain, maka ia sunat untuk menepati sumpahnya, bisa menjadi makruh, jika menjual sesuatu yang dimakruhkan. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur`an:

Dalam surat Al-Baqarah (2): 275



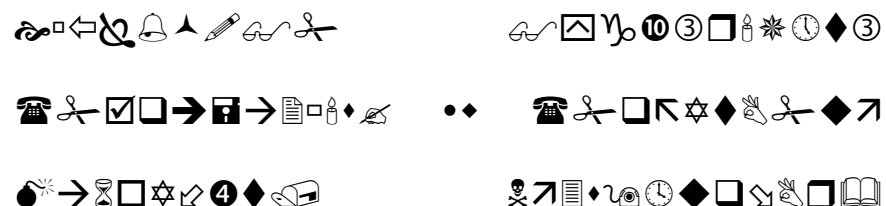
“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Surat Al-Baqarah (2): 282



“Dan dipersaksikanlah apabila kamu berjual beli”

Surat An-Nisa` (4): 29





“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”

Ketiga ayat diatas mengisyaratkan kebolehan jual beli walaupun disana dikaitkan dengan tujuan lain yang tidak dibolehkan, seperti ayat pertama dikaitkan dengan haramnya riba, ayat kedua dikaitkan dengan usaha mencegah perselisihan dan pertengkaran dalam jual beli dengan diadakannya saksi, ayat ketiga dikaitkan dengan larangan saling memakan harta orang lain secara bathil.

b. As-Sunnah

سئل النبي ص.م: اي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور

“Ditanya Nabi SAW, apa pekerjaan yang lebih baik? Jawabannya bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang *mabrur* (terhindar dari barang-barang haram dan tipu daya).”⁶

Pada hadist di atas dijelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik selain pekerjaan yang dilakukan kemampuan sendiri, juga setiap jual beli yang

⁶ Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Terjemah Bulughul Mar m*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009), h. 202.

mabr r, yang dimaksud dengan jual beli yang *mabr r* adalah jual beli yang bersih, tidak menipu, tidak berkhianat, dan tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah.

وإنما البيع عن تراض

“Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka”⁷

Maksud dari hadis ini adalah bahwa jual beli harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, jika dapat tekanan dalam jual beli maka jual beli tersebut tidak sah.

c. Ijma`

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli boleh dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, dimana barang yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁸

3. Rukun dan Syarat-Syarat.

a. Rukun Jual Beli.

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pelaku akad (*`Aqid*) yang terdiri dari penjual dan pembeli,
- 2) *Sigat* yang terdiri dari ijab dan kabul,

⁷ Ibn Maj h, *Sunan Ibn M jah*, Semarang : Toha Putra, t.t), II: 737 hadist nomor 2185 “Kitab al-Tijarah” “Bab Bai‘ al-khiy r” diriwayatkan oleh Abu Sa‘id al-Khuduri.

⁸ Rachmat Syafe`i, *Fiqh Mu`amalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet.ke.1 h. 75.

3) Barang yang diperjual belikan (*Ma`qud `Alaih*).⁹

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jaziri, rukun jual beli ada lima, yaitu:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang dijual
- 4) Transaksi berbentuk ijab dan kabul
- 5) Persetujuan dua belah pihak¹⁰

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun jual beli terdiri dari enam bagian yaitu dengan tambahan pada *ma`qud `alaih* dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu harga dan barang.¹¹

b. Syarat-syarat jual beli

Secara umum tujuan adanya syarat-syarat dalam jual beli adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga keselamatan pihak yang sedang berakad, menghindari jual beli *garar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

¹⁰ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, alih bahasa H. Rahmat djatnika dan Al mad Sumpeno. Bandung:Remaja Rosdakarya, 1991), Cet ke-1 h. 40.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *loc. cit* h. 141.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli¹² adalah yang berkaitan dengan para pihak yang berakad (*'qid*), *sigat*, dan *ma'q d 'alaih*. Syarat-syarat mengenai ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad (*'qid*).¹³

Adapun syarat-syarat bagi para pihak yang berakad adalah berakal, mumayiz, dewasa (*baliq*), dan atas kehendak sendiri.

Yang disebut dengan berakal adalah dapat memilih atau membedakan mana yang terbaik bagi dirinya, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.¹⁴

Menurut ulama hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad jual beli anak kecil yang telah mumayiz sepanjang diizinkan oleh walinya adalah sah, sedang jika tidak ada walinya akadnya menjadi *muaquf*¹⁵. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut batal karena tidak memenuhi persyaratan kecakapan hukum. Menurut ulama syafi'iyah ini ada empat golongan yang tidak sah dalam melakukan

¹² Menurut Ulama Hanafiah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli ada empat yaitu (a) Syarat terjadinya akad (*Syarat in 'aqad*) yang dimaksud adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara', jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka jual beli tersebut batal. (b) Syarat sahnya akad (*Syarat Sihah*), syarat ini terdiri dari dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. (c) Syarat pelaksanaan akad (*nafaz*), syarat ini ada dua yaitu, adanya unsur milkiyah atau wilayah dan benda yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain dan syarat kesemestian (*Syarat luzum*), syarat ini berkaitan dengan khair. Lihat Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*... .., h. 121-122. Lihat juga Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamala op. cit*, h 79-80

¹³ Menurut Ulama Syafi'iyah, syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi oleh *aqid* adalah *al-Rusyd*, yakni *Baliq*, berakal dan cakap hukum, tidak dipaksa, Islam dalam hal jual beli mushaf dan kitab hadis dan tidak kafir *Harbi* dalam hal jual beli peralatan perang. *Ibid*, hlm. 123. Lihat juga Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy, op.cit*, h 62-66.


¹⁴ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. Ke-1 h. 130.


¹⁵ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, op.cit*. h. 126.

akad jual beli, keempat golongan tersebut adalah anak kecil *mumayiz* atau belum, orang gila, hamba sekalipun mukallaf dan orang buta.¹⁶

Syarat berikutnya adalah dewasa¹⁷, yang dimaksud dewasa disini adalah sudah baligh atau cakap dalam bertindak (*Baligh ar-Rusyd*), maka jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, walaupun ada ulama yang membolehkan jual beli anak kecil dalam jumlah yang sedikit.

Syarat yang terakhir bagi para pihak yang berakad adalah atas kehendak sendiri. Yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah dalam melakukan jual beli tidak mendapatkan paksaan atau tekanan dari pihak manapun atau dengan kata lain kedua belah pihak suka rela dalam melakukan jual beli. Jual beli yang dilakukan dengan paksaan maka tidak sah, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur`an surat An-Nisa` (4): 29 yang berbunyi:





“ Kecuali dengan jalan peniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara kamu”

2. Sigat

Sigat dalam jual beli ada dua macam yaitu yang pertama berupa ucapan atau yang sering disebut dengan ijab dan qabul atau juga yang dapat menggantikan fungsi ijab dan qabul tersebut seperti tulisan

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala al-Mazahib*, op.cit. h. 145.

¹⁷ *Ibid*, h. 146.

atau melalui utusan. Yang kedua dengan serah terima (*Mu`atah*), menurut ulama Syafi`iyah jual beli hanya dengan serah terima tanpa ada ijab dan qabul maka jual beli tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Imam al-Ghazali jual beli hanya dengan serah terima tanpa ada sigat dibolehkan untuk barang yang berjumlah sedikit.¹⁸

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a. Ijab dan qabul terjadi dalam satu majelis
- b. Ijab harus sesuai dengan qabul, baik dalam ukuran, sifat (jenis)uang, baik langsung maupun ditangguhkan.
- c. Antara ijab dan qabul tidak ada tenggang waktu (lama)yang mengesankan penolakan.
- d. Kedua belah pihak sama-sama mendengar perkataan masing-masing.

3. *Ma'q d 'Ala h*.

Adapun syarat-syarat *Ma'q d 'Ala h* adalah sebagai berikut:

- a. Suci barangnya.

Yang dimaksud dengan suci barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang najis, atau digolongkan

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.* h.17.

kedalam benda yang diharamkan, baik barangnya maupun harganya. Sebagaimana dalam hadis berikut;

إن الله و رسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

“Sesungguhnya Allah mengharamkan telah jual beli khamr, bangkai, dan patung (berhala)”¹⁹

`illat pengharamanjual beli khamar, bangkai dan babi adalah karena ketiganya termasuk kedalam barang najis, sementara jual beli patung karena dikhawatirkan untuk dijadikan berupa yang disembah atau dipuja.²⁰

b. Dapat dimamfaatkan

Yang dimaksud dengan dapat dimamfaatkan adalah barang yang telah diperjual belikan tersebut dapat dimamfaatkan secara syara` atau tidak bertentangan dengan yang telah ditentukan oleh syara`, maka jual beli serangga tidak boleh kecuali untuk dimamfaatkan.²¹

c. Dapat di serah terimakan.

Yang dimaksud dapat diserah terimakan adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang rampasan, maka tidak sah menjual barang yang masih dirampas, walaupun itu milik

¹⁹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t,t: Dar al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), III: 43, “Kitab al-Buyu,” “Bab Ba’i al-Maitah wa al-Ashnam.”

²⁰ Mushtafa Kamal, dkk, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), Cet. Ke-2, h. 356.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, h. 148.

orang dirampas. Dan juga tidak sah juga tidak sah menjual barang yang menjadi agunan atau menjual belikan ikan yang berada ditengah laut, karena keduanya mengandung *garar* dan keduanya tidak dapat diserahkan pada saat-saat transaksi jual beli terjadi.

d. Barang yang dijual milik penjual ketika dijual.

Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan harus milik sah penjual, maka menjual barang yang bukan haknya tidak sah.

e. Berupa materi dan sifat-sifatnya dijelaskan dengan tegas.

Tidak sah menjual barang yang tidak jelas mengenai sifat-sifatnya, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

f. Akadnya tidak dibatasi waktu, misalnya dengan mengatakan "saya jual unta ini kepadamu dengan harga sekian dalam waktu satu tahun."

4. Macam-macam

Jual beli dari segi objeknya terbagi kepada empat macam, yaitu:²²

- a. *Bai`al-Muqayadah*, atau *al-`ain bi al-`ain*, yakni jual beli barang dengan barang yang lebih dikenal dengan jual beli barter, seperti jual beli beras dengan sayuran.

²² Ghufroon A. Mas`adi, *op. cit*, h. 141-142.

- b. *Bai` al-Mutlaq* atau *Bai` al-`ain bi ad-dain* yakni jual beli barang dengan harga secara mutlak, seperti jual beli barang dengan uang (baik Dolar, Dirham ataupun Rupiah).
- c. *Bai`as-sarf* atau *Bai` al-dain bi ad-dain*. dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mab`* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai harga, bisa berupa baeang dan bisa berupa hutang (*dain*) namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah oleh karena itu harga dalam akad dalam berlaku sebagai barang.

Sedangkan dari segi harga, maka jual beli terdiri dari empat macam, yaitu:²³

- a. *Bai` al-Murabaha*, yakni jual beli *mabi`* dengan *ra`s al mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
- b. *Bai` at-Taulyah*, yakni jual beli *mabi`* dengan harga asal tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
- c. *Bai` al-Wadi`ah*, yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon
- d. *Bai` al-Musawamah*, yaitu jual beli barang dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga aslinya.

²³ *Ibid.* h. 142.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Menurut jumhur ulama hukum jual beli terbagi dua yaitu, jual beli *sah h* dan jual beli *gairu sah h*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah hukum jual beli terbagi tiga yaitu, *sah h*, *b til* dan *f sid*. *Gairu sah h* mereka bedakan menjadi jual beli *b til* dan *f sid*.

Adapun macam-macam jual beli yang *b til* dan *f sid* adalah sebagai berikut²⁴:

- a. Jual beli atas barang yang tidak ada (*Bai` al-ma'd m*).

Contohnya jual beli janin dalam perut induknya dan beli buah yang belum tampak. Jual beli seperti ini oleh jumhur ulama tidak sah. Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim berpendapat bahwa jual beli jenis ini ketika akad berlangsung adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung.

- b. Jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan (*Bai` al-Ma`juz at-Taslim*).

Contohnya adalah jual beli burung yang ada di udara atau jual beli ikan yang ada di laut. Para ulama sepakat jual beli seperti ini tidak sah.

- c. Jual beli dengan penipuan (jual beli *Garar*)

Jual beli jenis ini tidak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw:

²⁴ *Ibid*, h. 131-137

ﷺ رسول الله ص.م عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

“Rasulullah SAW, melarang jual beli *hasah* dan jual beli *gharar*”.²⁵

d. Jual beli barang najis.

Jual beli barang najis menurut para fuqaha hukumnya tidak sah, tetapi mengenai benda-benda najis yang tidak dinyatakan dalam hadis maka ulama berbeda pendapat, menurut ulama Hanafiyah dan Zahiriyah jual beli benda najis yang dapat bermamfaat seperti jual beli kotoran hewan itu boleh selama tidak untuk dimakan.

e. Jual beli *`urban* (*Bai` al-Urban*).

Jual beli *`urban* yaitu jual beli dengan setengah harga, jika pihak pembeli membatalkan untuk membeli maka setengah harga yang sudah dibayar tersebut menjadi *hibah*. Menurut jumhur selain Hanabilah jual beli seperti ini tidak sah karena mengandung *garar*.

f. Jual beli yang tidak jelas (*Bai` al-Mujh l*)

Yakni jual beli *mabi`* atau *samannya* tidak dinyatakan secara jelas yang dapat menimbulkan persengketaan. Hukum jual beli ini adalah *f sid*²⁶. Namun jika tidak menimbulkan persengketaan hukumnya sah. Demikian ini adalah pandangan ulama Hanafiyah.

²⁵ Ibn Majah, *op.cit.* nomor hadist 2194, “Bab an-Nahyi`an Bay`i Hasah wa`an Ba`i al-Gharar.”

²⁶ Yang dimaksud dengan jual beli *f sid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara` namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Lihat Ghufon A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, *op. cit.* h. 131.

g. Jual beli orang buta.

Menurut jumhur jual beli orang buta termasuk jual beli yang *sah* jika barang yang dibeli diterangkan sifat-sifatnya, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jual beli seperti ini tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan antara barang yang bagus dengan barang yang tidak bagus.

h. Jual beli *fudl*.

Jual beli *fudl* yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli semacam ini tidak sah, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan dengan syarat ditangguhkan sampai ada izin dari pemiliknya.

i. Jual beli riba

Menurut jumhur ulama jual beli seperti ini (baik riba *nas'ah* ataupun riba *fadl*) termasuk jual beli yang *batil*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini termasuk jual beli *fisid*.

j. Jual beli *al-`inah*.

Jual beli ini dimaksudkan sebagai rekayasa untuk menghindari piutang riba. Jumhur ulama bersepakat jual beli seperti ini tidak sah.

B. Cacing

1. Klasifikasi Cacing.

Cacing tanah tergolong dalam kelompok binatang *Avertebrata* (Hewan tidak bertulang belakang) sehingga sering disebut binatang lunak. Dunia hewan berdasarkan tingkat kompleksitas dan urutan evolusinya terbagi atas 15 *Phyla*. Cacing tanah termasuk kedalam *phylum Annelida*²⁷.

Ciri-ciri *Phylum Annelida* adalah sebagai berikut:

- a. Tubuhnya simetri bilateral, silindris, dan segmen-segmen serta pada permukaan tubuh terdapat sederetan dinding tipis atau sekat-sekat.
- b. Saluran pencernaan makanan dan mulut terletak pada bagian depan(muka), sedangkan anus dibagian belakang.
- c. Mempunyai rongga tubuh (*Coelom*) yang berkembang dengan baik.
- d. Bernafas dengan kulit atau insang.
- e. Mempunyai peredaran darah tertutup dan darahnya *Hemoglobin*.

²⁷ *Phylum Annelida* merupakan sub *phylum* cacing (*Vermes*). *Annelida* berasal dari kata *annulus* yang berarti cincin, karena tubuhnya beruas (bersegmen) mirip susunan cincin, peruasan tubuh luar dalam, tubuh runcing ujung pangkal, ada bulu kasar menonjol dari bagian bawah tiap ruas, hidup ditanah lembab dan basah, air tawar dan air laut, dalam lumpur dan pasir ada juga dipohon. Kebanyakan hidup bebas, tapi ada juga *ekstoparasit* (Parasit dibagian tubuh Topangan). Lihat Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999), cet.ke-1. h. 56.

f. Sistem reproduksi *annelida* secara seksual dan aseksual.

Walaupun *annelida* bersifar *hermafrodit* tetapi untuk terjadinya fertilisasi diperlukan perkawinan antara dua individu cacing²⁸.

Phylum Annelida dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelas *Polychaeta*, *Oligochaeta*, dan *Hirudinae*²⁹.

Ciri-ciri dari kelas *Polychaeta* adalah cacing-cacing *Polychaeta* bertubuh memanjang dapat lebih dari 30 cm, silindris (agak pipih *Dorsoventral*) dan bersegmen, hidup dalam pasir atau menggali batu-batuan didaerah pasang surut dan aktif diwaktu malam. Pernafasan langsung melalui kulit, terutama di *Parapodia*. Darahnya mengandung pigmen merah (*Hemoglobin*). Sistem ekskresi dari kelas ini dalam tiap segmen kecuali yang terakhir dan yang pertama, terdapat sepasang *nefridium* untuk membersihkan segmen disebelah anterior dari segmen tempat *nefridium* terdapat. *Palpus* dan *Tentakel* pada hewan ini merupakan indera yang menerima saraf dari *ganglion supraesophageal*. Terdapat mata sederhana sebanyak 4 buah yang terdiri dari kornea, lensa dan retina. Contohnya *nereis sp* yang terkenal dengan cacing diam (*calmworm*).³⁰

²⁸ D.A. Pratiwi, dkk, *Buku Penuntun Biologi SMA Untuk kelas X* Jakarta: Erlangga, 2004). h, 167.

²⁹ Rahmad Rukmana, *op.cit*, h. 14.

³⁰ Mukayat Djarubito Brotowidjoyo, *Zoologi Dasar*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1994), cet.ke-3. h. 100.

Ciri-ciri dari kelas *Oligochaeta*³¹ adalah tubuhnya tersusun atas 115-200 segmen, panjang tubuh ada yang mencapai 1m okoran terkecil 0,5 mm, dan tidak mempunyai parapodia.³² *Olgochaeta* merupakan salah satu kelas dari sub *Phylum Annelida* yang merupakan keluarga cacing tanah, tidak memiliki tonjolan kaki parapodia, setae sedikit dan pendek tak berinsang, *monoccius*, *berclitellun*, berkepompong, tak berberudu, terutama ditanah lembab dan airtawar.³³ darah cacing tanah berwarna merah. Darah terdiri dari cairan plasma yang mengandung *emoebosit*, yaitu butiran-butiran yang tidak berwarna , yang berwarna itu hanya plasmanya, karena mengandung hemoglobin yang larut. Sistem ekskresinya dalam setiap segmen terdapat sepasang *netfridium*, kecuali segmen pertama dan terakhir. Sistem saraf berupa sebuah rantai *ganglion ventral*, tiap segmen mulai dengan satu rantai, mulai dari segmen ke empat, dalam kulit cacing tanah terdapat organ-organ sensoris yang sensitif terhadap sentuhan dan cahaya.³⁴ Pernapasan *oligochaeta* dilakukan pada permukaan tubuh, keluar masuknya gas terjadi secara difusi, makanannya berupa zat-zat organik yang diperoleh melalui sisa-sisa tanaman, sisa-sisa hewan, atau sisa organisme lain

³¹ Cacing berasal dari kata *Oligos* yang artinya sedikit, dan *chaeta* yang artinya rambut. Lihat, D. A. Pratiwi, *Buku Penuntun Biologi, op. cit*, h. 167.

³² Rahmad Rukmana, *op. cit*, h. 15.

³³ Wildan Yatim, *op. cit*, h. 56.

³⁴ Mukayat Djarubito Brotowidjoyo, *op. cit*, h. 104.

yang ada pada tumbuhan dan tanah. Contohnya antara lain *Lumbricus terrestris* (Cacing Tanah).³⁵

Adapun ciri-ciri dari *hidinae* adalah hidup parasitis atau bahkan predator. Hidup dalam air tawar atau didarat, tidak mempunyai parapodia atau *setae-setae*, mempunyai 33 segmen dengan ditambah sebuah *prostomium*, mempunyai alat penghisap *posterior* atau *anterior*, bersifat *hermafrodit*, pernapasan berlangsung melalui permukaan kulit, darahnya mengandung hemoglobin (Sebagai larutan) mengalir dalam pembuluh-pembuluh longitudinal yang berotot disebelah lateral tubuh. Sistem eksresinya setiap segmen dari segmen ke-7-23 berisi *nefrida* yang berpasangan. Masing-masing *nefrida* mempunyai ekspansi yang berupa pesikula yang terbentuk gelembung dan merupakan muara saluran eksresinya, sistem sarafnya sama dengan cacing tanah, tetapi pada kelas ini ganglion-ganglion ventralnya lebih jelas, mempunyai mata 10 buah (5 pasang) dan terdapat 5 segmen pertama, pada segmen –segmen selanjutnya terdapat organ-organ sensoris, contoh dari kelas ini adalah lintah³⁶.

Dari ketiga kelas diatas, yang banyak digunakan atau dibudidayakan adalah kelas *oligochaeta* yang mempunyai banyak famili. Famili cacing tanah yang banyak diminati adalah *famili*

³⁵ *Lumbricus terrestris* ini bisa dikatakan sebagai *bulldozer* mini karena cacing ini menghisap apa saja yang berada dimuka mulutnya baik sisa makanan, bakteri, atau yang parasit dilahapnya, cacing ini juga bermamfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Lihat, Rismunandar, *Tanah Seluk Beluk Bagi Pertanian*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993). cet.ke-5. h. 49-51.

³⁶ Mukayat Djarubito Brotowidjoyo, *op. cit*, h. 106.

lumbricidae, magascolecidae, octochaetidae, dan acanthrodrilidae.

Adapun macam-macam spesies dari famili-famili diatas adalah sebagai berikut³⁷:

NO	Famili	Spesies
1	<i>Lumbricidae</i>	<i>a. Lumbricus Terrestris</i> <i>b. Lumbricus Rubellus</i> <i>c. Eisenia Foetida</i> <i>d. Allolobophora</i> <i>Caliginosa</i>
2	<i>Megascolecidae</i>	<i>e. Allolobophora</i> <i>Chloratica</i>
3	<i>Acanthrodrilidae</i>	<i>a. Pheretima Asiatica</i>
4	<i>Octochaetidae</i>	<i>b. Perionyx Exavatus</i> <i>Diplocordia Verrucosa</i> <i>Eudrilus Eugeuniane</i>

Dari sembilan spesies cacing tanah yang paling populer untuk dibudidayakan adalah spesies *Lumbricus Rubellus*. Cacing ini merupakan cacing impor yang mempunyai potensi lebih baik

³⁷ Dari spesies-spesies yang disebutkan dalam tabel diatas spesies *Lumbricus rubllus*, *Eisenia foetida*, *Pheretima asiatica*, dan *Eudrilus eugeumiae* merupakan jenis cacing tanah yang telah dibudidayakan dan dikomersialkan di Indonesia, di Amarika, kanada dan Eropa jenis cacing yang telah dibudidayakan adalah *Lumbricus rubllus*, *Eisenia foetida* dan *Eudrilus eugeumiae*. Sedangkan di Filipina cacing janis *Perionyx exavatus* merupakan spesies cacing tanah yang sedang dalam pengkajian. Lihat Rahmat Rukmana, *op. cit*, h. 16.

dibandingkan cacing lokal dan lebih menguntungkan dibandingkan cacing lokal karena ditinjau dari segi produktivitasnya dalam setahun saja seekor cacing *lumbricus rubbellus* dapat menghasilkan sebanyak 106 kokon yang setiap kokon dapat menghasilkan 1-4 juvenil (anak cacing), sedangkan cacing jenis cacing tanah yang lain hanya dapat menghasilkan kokon sekitar 20-40 kokon per tahun³⁸.

2. Jenis-Jenis Cacing Tanah.

Jenis-jenis cacing tanah yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia adalah:

a. *Lumbricus Ruellus*.

Bentuk tubuh cacing ini lebih kecil dibandingkan dengan cacing tanah jenis lainnya tetapi jika diternakkan tubuhnya bisa menyamai atau melebihi yang lain, bertubuh pipih, memiliki segmen antara 90-195 dengan klitellium terletak disegmen 27-32. Untuk bergerak cacing ini menggunakan otot-otot tubuhnya yang panjang dan tebal dengan lendir yang tubuhnya dapat mempermudah pergerakannya ditempat yang lembab dan kasar, selain itu lendir tersebut pun dapat digunakan untuk mempertahankan tubuh. Cacing ini juga memiliki setae yang memiliki daya lekat sangat kuat sehingga dapat melekat pada permukaan benda dengan erat³⁹. Warna tubuh bagian punggung (*dorsal*) cekelat cerah sampai ungu kemerah-merahan, warna tubuh

³⁸ Rony Palungkun, *op.cit*, h. 7.

³⁹ *Ibid*, h. 8.

bagian ventral krem, dan bagian ke ekor ke kuning-kuningan, lubang kelamin jantan terletak pada segmen ke-14 dan lubang kelamin betina pada segmen ke-13, gerakan cacing ini lamban dan kadar air tubuh cacing tanah berkisar antara 70%-78%⁴⁰.

b. Cacing Merah.

Cacing merah termasuk kedalam spesies *pheretima*⁴¹, cacing ini merupakan cacing lokal dan mudah untuk dibudidayakan, tubuhnya kecil dengan panjang 7 cm-8 cm atau kurang dari 10 cm, bewarna kemerah-merahan, cacing merah umumnya terdapat pada tumpukan sampah rumah tangga dan sampah pasar, dibawah batang pisang yang sudah roboh, dan dibawah bahan organik lainnya⁴².

c. Cacing Kalung

Sama seperti cacing merah, cacing ini tergolong cacing lokal. Adapun ciri-ciri cacing ini adalah ukurannya yang lebih besar dibandingkan dengan jenis cacing tanah lainnya dan lebih kecil daripada cacing sondari, mempunyai panjang tubuh antara 14-20 cm. Bentuknya bulat berwarna coklat keungu-unguan atau agak kelabu, pada umumnya cacing ini hidup pada tempat yang banyak

⁴⁰ Rahmat Rukmana, *op. cit.*, h. 24.

⁴¹ Spesies *pheretima* mempunyai segmen sebanyak 95-150 segmen klitellumnya terletak pada segmen 14-16, tubuhnya berbentuk gilik panjang dan silindris warna merah keunguan. Lihat "Budidaya Cacing Tanah (*Lumbricus sp.*)," http://www.iptek.net.id/budidaya_peternak.php, akses 22 mei 2012.

⁴² Rahmat Rukmana, *op. cit.*, h. 26.

mengandung kotoran ternak dan dibawah pohon pisang yang telah roboh⁴³.

d. Cacing Koot.

Cacing ini mempunyai ukuran tubuh lebih panjang dan lebih besar dibandingkan dengan ukuran tubuh cacing merah, tetapi lebih pendek dan lebih kecil dari ukuran cacing kalung, cacing ini berwarna coklat kekuning-kuningan. Cacing ini sering digunakan untuk memancing⁴⁴.

e. Cacing sondari.

Cacing ini ukuran tubuhnya sangat besar dibandingkan dengan jenis cacing lainnya, cacing ini berwarna hitam dengan segmenyang sangat nyata menyerupai sisik⁴⁵.

f. Cacing Cuk.

Ciri-ciri dari cacing ini adalah hidup pada lumpur yang subur dibawah permukaan air selokan atau dasar sungai yang airnya mengalir tidak deras dengan kedalaman air 20-30cm. Tubuhnya bewarnah merah muda, geraknya meliuk-liuk ditempat, satu cacing dengan lainnya berjarak rapat. Cacing ini termasuk cacing yang mudah dibudidayakan dan harga jualnya cukup tinggi.

⁴³ *Ibid* , h. 25

⁴⁴ *Ibid*, h. 26.

⁴⁵ *Ibid*, h. 27.

3. Ciri-Ciri Fisik Cacing Tanah.

Ciri-ciri fisik dari cacing tanah antara lain tubuh nya mempunyai lima bagian yang terdiri atas bagian depan (*anterior*), bagian tengah, bagian belakang (*posterior*), bagian punggung (*dorsal*), dan bagian bawah perut (*ventral*). Bentuk tubuh cacing tanah pada umumnya silendris memanjang, mulutnya terdapat segmen pertama sedangkan anus terdapat pada segmen terakhir⁴⁶.

Bibir mulut (*prostomium*) cacing tanah berupa tonjolan daging yang dapat menutup lubang mulut. Bibir mulut dan anus tidak merupakan segmen tubuh, melainkan bagian dari tubuh sendiri. Pada cacing tanah dewasa terdapat alat untuk mempersiapkan proses perkembangan tersebut "*klitelum*"⁴⁷.

Tubuh cacing tanah bersegmen-segmen, pada setiap segmen terdapat rambut keras disebut "seta" (*setae*) yang berfungsi sebagai alat pencengkram atau pelekak yang kuat pada tempat cacing tanah itu berada. Daya lekat seta sangat kuat sehingga cacing tanah dapat melekat erat pada permukaan benda. Daya lekat ini akan melemah saat cacing akan bergerak maju. Gerakan cacing tanah juga diatur oleh otot memanjang dan otot melingkar. Seta juga dapat membantu cacing tanah, elakukan perkawinan⁴⁸.

⁴⁶ *Ibid*, h. 16-18.

⁴⁷ Klitellum merupakan bagian tubuh cacing yang menebal, terletak diantara anterior dan posterior, warnanya lebih terang dari tubuhnya. *Ibid*, h. 18.

⁴⁸ Roni Palungkun, *op. cit*, h. 8.

4. Mamfaat Cacing

Cacing tanah bisa dikatakan sebagai makhluk yang sangat lemah, hina dan menjijikkan. Tetapi dibalik kelemahannya tersebut cacing mempunyai mamfaat yang sangat banyak, diantaranya adalah:

a. Sebagai penghasil punpuk organik

Pupuk organik diperoleh dari hasilpengomposan atau perombakan bahan organik pada saat kondisi lingkungan yang lembab oleh sejumlah bahan organik pada kondisi yang lembab oleh sejumlah mikroba atau organisme pengurai, salah satu organisme pengurai adalah cacing tanah. Kemampuan cacing tanah dalam mengurai 3-5 kali lebih cepat dibandingkan mikroba. Cacing tanah mampu mengubah bahan organik, kotoran sapi dan limbah dapur menjadi tanah yang subur, tanah yang subur itu merupakan pupuk organik yang sangat berkualitas, lebih berkualitas dari pupuk yang lain. Cacing tanah juga dapat menghasilkan kascing (bekas cacing) yang digunakan sebagai pupuk organik. Pupuk kascing dapat dimamfaatkan untuk usaha pada pertanian misalnya usaha tani sayuran, buah-buahan, tanaman hias, pertanian dalam pot, serta lapangan golf⁴⁹. Cacing tanah juga bisa menjadi komoditas ekspor dengan mengolah kotorannyayang bisa disebut dengan kascing menjadi pupuk,

⁴⁹ Rahmat Rukmana, *op.cit*, h. 31.

pupuk dari kascing ini merupakan pupuk yang ramah lingkungan karena pupuk ini tidak bau, dan bersih dari kotoran maupun serangga. Kascing mengandung berbagai komponen yang bersifat biologi maupun sifat kimiawi yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan pertumbuhan tanaman. Komponen biologis yang terdapat dalam kascing adalah hormon pengatur tumbuh seperti *giberelin*, *sitokinin*, dan *auxin*. Sementara komponen kimianya adalah seperti dalam tabel berikut⁵⁰.

Komponen Kimiawi	Komposisi (%)
Nitrogen (N)	1,1-4,0
Fosfor (P)	0,3-3,5
Kalium (K)	0,2-2,1
Belerang (S)	0,24-0,63
Magnesium (Mg)	0,3-0,6
Besi (Fe)	0,4-1,6

b. Sebagai Pengelolah Limbah

Cacing tanah merupakan salah satu organisme yang dapat digunakan sebagai indikator kesehatan lingkungan, aktivitas cacing tanah tidak hanya mendaur ulang bahan-bahan organik tapi juga bahan-bahan anorganik limbah-limbah logam dan

⁵⁰ Rony Palungkun, *op.cit*, h. 15

nonlogam yang beacun oleh karena itu cacing tanah dapat digunakan untuk mengevaluasi kontaminasi⁵¹. Cacing tanah juga bermamfaat sebagai pengolah limbah baik limbah pertanian maupun limbah peternakan. Di Amerika cacing tanah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penyubur lahan peertanian sampai pengurai sampah organik baik dari pertanian maupun dari peternakan.⁵²

c. Sebagai Bahan Pakan Ternak

Kualitas protein⁵³ cacing tanah lebih tinggi dibandingkan dengan protein ikan. Protein cacing tanah mengandunga 20 asam amino yang terdiri atas, *lisin, triptopan, histidin, fenilalanin, isoleusin, leusin, threonin, methionin, valin orginine, glisin, alanin, sistin, tirosin, asam aspartik, asam glutamat, prolin, hidroksiprolin, serin* dan *sitruline*. Kedua puluh asam amino tersbut dibagi kedalam dua bagian, yaitu asam amino *esensial* dan asam amino *nonesensial*. Adapun

⁵¹ Jenis cacing tanah yang digunakan untuk mengatasi kontaminasi tanah adalah jenis spesies *Lumbricus Rubellus*, cacing tanah *Lumbricus Rubellus* yang hidup didaerah normal berwarna coklat kemerahan sedangkan cacing tanah *Lumbricus Rubellus* yang tercemar berwarna pucat. Lihat Zeily Nuracman, "Cacing Tanah Mengolah Lingkungan yang Tercemar," *Harian Kompas*, Senin, 7 April 2012), h. 10.

⁵² Di Indonesia dampak pencemaran limbah pertanian dan peternakan sangat terasa di perairan sungai, limbah tersebut berupa pupuk dan pestisida yang terbawa air atau berbagai antibiotik, hormon, pakan yang terbuang atau kotoran ternak dalam jumlah besar, limbah-limbah oni lebih berbahaya dibandingkan dengan limbah industri. Lihat Zeily Nuracman, "Cacing Tanah Mengolah Lingkungan yang Tercemar," *Harian Kompas*, Senin, 7 April 2012), h. 10.

⁵³ Protein berasal dari kata *protos* atau *proteos* yang berarti pertama atau utama, oleh karena itu protein merupakan komponen utama bagi sela manusia atau hewan. Lihat Anna Poedjiadi, *Dasar-Dasar Biokimia*, cet.ke-1 (Jakarta: UI press 1994), hlm 81

persentase kandungan asam amino esensial cacing tanah dibandingkan daging ikan adalah sebagai berikut:⁵⁴

No	Asam Amino	Cacing Tanah (%)	Daging (%)	Ikan (%)
1	Argini	4,13	3,48	3,909
2	Sistin	2,29	1,07	0,80
3	Asam Glutamat	-	-	3,40
4	Glisin	2,92	2,09	4,40
5	Histidin	1,56	0,97	1,50
6	Isoleusin	2,58	1,33	3,60
7	Leusin	4,48	3,54	5,10
8	Lisin	4,33	3,08	6,40
9	Methionin	2, 18	1,45	1,80
10	Fenilalanin	2,25	2,17	2,60
11	Serin	2,88	2,15	-
12	Threonin	2,95	1,77	2,80
13	Triptopan	-	-	0,70
14	Tirosin	1,36	1,29	1,80
15	Valin	3,01	2,22	3,50

⁵⁴ Rahamat Rukmana, *Budidaya Cacing....*, hlm. 30

Oleh karena itu cacing tanah sangat potensial untuk dijadikan pakan ternak. Kandungan protein tepung ikan hanya sekitar 58%, sedangkan kandungan protein tepung cacing tanah mencapai 64-76%. Cacing tanah juga menyebabkan berat telur dan kadar protein telur lebih tinggi dibandingkan tepung ikan.⁵⁵

d. Sebagai Bahan Baku Makanan dan Kosmetika

Kandungan asam amino yang terkandung pada cacing tanah lebih lengkap dibandingkan dengan protein yang ada dibandingkan dengan protein yang ada pada ikan dan daging. Sehingga nilai gizinya lebih banyak dan dapat dikonsumsi, tidak hanya dijadikan sebagai pakan ternak tetapi juga bisa digunakan sebagai makanan manusia. Hal ini dilakukan masyarakat Jepang dan beberapa Negara Eropa, di Jepang terdapat minuman yang terbuat dari cacing tanah yang biasa disebut dengan *vermijuice*. *Vermijuice* merupakan minuman segar yang berkhasiat menyembuhkan sakit kepala. Sedangkan di Eropa terdapat berbagai jenis makanan yang terbuat dari cacing tanah seperti, *worm buger*, *worm spaghetti*, *crispy eartworm*, dan *verne de terre*. Cacing tanah juga bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik seperti pelembab kulit dan lipstik, enzim dan asam amino yang

⁵⁵ Rony Palungkun, *op.cit.* h. 18.

terdapat pada tubuh cacing berguna dalam proses pergantian tubuh yang rusak, seperti untuk menghaluskan kulit.

e. Sebagai Bahan Baku Obat

Cacing tanah telah dijadikan sebagai bahan obat-obatan oleh masyarakat Indonesia sejak lama, spesies cacing tanah yang paling banyak digunakan adalah *Lumbricus Rubellus* dan *Pheretima Aspergillum* (yang lebih dikenal dengan cacing kalung), di Indonesia cacing tanah yang banyak dibudidayakan adalah *Lumbricus Rubellus* sedangkan untuk *Pheretima Aspergillum* belum banyak dibudidayakan. Cacing tanah *Pheretima Aspergillum* merupakan spesies yang biasa digunakan untuk penyakit tifus dan demam.⁵⁶

C. Jual Beli Cacing

Selama ini pakan ternak seperti pakan untuk itik dan ayam menggunakan tepung ikan yang di impor dari luar negeri. Namun dengan adanya krisis moneter yang melanda negara Indonesia dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar, menyebabkan harga pakan tersebut menjadi naik, dan membuat peternak ayam dan itik semakin menyusut karena tidak mampu untuk memenuhi pakan untuk ternaknya.

Karena semakin mahalnya pakan ternak tersebut, maka para peternak mencari alternatif lain untuk mencari pakan ternak yang lebih murah, dan dari hasil berbagai penelitian yang telah dilakukan terhadap

⁵⁶Dondin Sajuthi, dkk, "Ekstrak Antipertik Ekstrak Cacing Tanah," <http://www.kompas.com/ilmupengetahuan/index.htm>, akses 6 juni 2012

tepung cacing tanah, ternyata kadar protein yang terdapat dalam cacing tanah lebih tinggi dibandingkan dengan kadar protein yang terdapat pada tepung ikan. Oleh karena itu banyak peternak mulai berburu cacing tanah, sehingga banyak yang membudidayakan cacing tanah, bahkan menjadi peluang usaha yang menguntungkan, bahkan bisa menjadi komoditas ekspor dengan mengolah kotoran cacing (kascing) menjadi pupuk.⁵⁷

Harga kotoran cacing (kascing), hanya digunakan sebagai pupuk lebih murah dibandingkan dengan harga pupuk dari pabrik, dan manfaatnya pun lebih baik dibandingkan dengan dengan pupuk anorganik produksi pabrik, sebagaimana dituturkan oleh Ahdiyat seorang petani maju di Cipanas, bahwa “pemupukan dengan menggunakan kascing 800gr/tanaman masih lebih murah dengan ditambah pestisida Rp.300, hanya habis Rp.1500/tanaman, sedangkan jika dengan pupuk pabrik mencapai Rp. 2.200,” Jelasnya.⁵⁸

Adapun analisis usaha budidaya cacing tanah di Bandung pada tahun 1999 adalah⁵⁹:

⁵⁷“Mengelolah Cacing Tanah Menjadi Pupuk Komoditas Ekspor,” <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/usaha/indek.html>, akses 19 september 2012.

⁵⁸ Karjono, “Sayuran Subur Berkat Kascing,” *Majalah Trubus*, No, 357, Agustus 2011), Th. Ke-30. h. 23.

⁵⁹“Pernakan Budidaya Cacing Tanah (Lumbricus sp),” http://www.iptek.net.id/budidaya_pernakan.php. diakses 22 Mai 2012.

1. Modal Tetap

- a. Sewa tanah seluas 200 M²/tahun.....Rp. 120.000
- b. Kandang Pelindung: bahan bambu
dan atap rumbia.....Rp. 150.000
- c. Kandang ternak uk 1,5 x 18 M²,
Tg 50cm:11 buah.....Rp. 600.000
- d. Media:
 - 1. Bahan Media 6 ton, @Rp.100.....Rp. 600.000
 - 2. Plastik 200m, @Rp. 1600/m.....Rp. 320.000
 - 3. Pelepah pisang.....Rp. 25.000+
- Total.....Rp.1.815.000

2. Biaya Penyusutan

- a. Tanah.....Rp. 40.000
- b. Kandang pelindung.....Rp. 16.667
- c. Kandang ternak.....Rp. 66.667
- d. Media
 - a. Bahan media.....Rp. 300.000
 - b. Plastik.....Rp. 160.000
 - c. Pelepah pisang.....Rp. 6.250+
- Total.....Rp. 589.584

3. Modal Kerja

- a. Bibit sebanyak
40kg, @Rp.200.000/kg.....Rp. 8.000.000

- b. Pakan dalam bentuk limbah sayur 5 ton @ Rp.500
Rp. 2.500.000
- c. Tenaga kerja 4 orang, @ 400.000/bulan
Rp. 400.000+
- Total.....Rp. 10.900.000
4. Jumlah Modal yang dibutuhkan.
- a. Modal Tetap.....Rp. 1.815.000
- b. Modal Kerja.....Rp.10.900.000+
- Total.....Rp.12.715.000
5. Produksi/ 4 bulan.
- Selama 4 bulan 1600 Kg, @Rp. 21.000/Kg
Rp. 336.000.000
6. Biaya produksi/4 bulan.
- a. Biaya Penyusutan.....Rp. 589.584
- b. Modal kerja.....Rp. 10.900.000+
- Total.....Rp. 11.489.584
7. Keuntungan/4 bulan.
- a. Produksi/4 bulan.....Rp. 336.000.000
- b. Biaya produksi/4 bulan.....Rp. 11.489.584 –
- Total.....Rp.313.020.822
- Keuntungan selama 4 bulan.....Rp.313.020.822
- Untung bersih produksi Rp. 313.020.822/120 hari
Rp. 2.608.506

$$\text{BEP} = \text{Biaya Tetap} [1 - (\text{Biaya Penyusutan} : \text{Keuntungan})]$$

$$= 1.815.000 [1 - (589.584 : 324.510.416)]$$

$$= 1.815.000 [1 - 0,0018]$$

$$= 1.815.000 \times 0,9982$$

$$= 1.811.733$$

BAB III

MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWANYA TENTANG HUKUM JUAL BELI CACING

A. Sejarah MUI

Kemajuan budaya dan peradaban manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah yang memerlukan pemecahan, karena tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur`an dan al-Hadist. Begitu juga ulama-ulama terdahulu tidak secara eksplisit menjelaskan persoalan-persoalan baru tersebut sehingga banyak masyarakat yang haus akan jawaban mengenai hal tersebut. Hal ini membuat Ulama Indonesia bersepakat untuk membuat lembaga yang dapat memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang ada pada masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 yang didahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama.¹

¹Ma`ruf Amin, dkk, *op.cit*, h. v

No. 28 tanggal 1 Juli 1975². Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk “Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)” yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat³, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari angkatan darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan.

Momentum berdirinya MUI setelah 30 tahun Indonesia merasakan kemerdekaan yaitu ketika Indonesia berada pada fase kebangkitan, dimana pada saat itu bangsa Indonesia sibuk dengan politik kelompok masing-masing sehingga tidak memperdulikan masalah rohani yang ada pada masyarakat. Keberagaman dan kemajuan umat Islam dalam keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran politik sering membuat lemah dan dapat dijadikan pertentangan diantara umat Islam di Indonesia.

Sebagai suatu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun tujuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana tercantum dalam pedoman dasar dan rumah tangga MUI pada Bab III, pasal 13 adalah menggerakkan

² Musyawarah pertama ini diketahui oleh letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'i dan K.H. M. Syukri Ghazal lihat “*MUI Berdiri, Tumbang dan Berkembang*”, http://www.majelisulama.com/mui_in/articel.php?, akses 19 Juli 2012.

³ Majelis Ulama unsur organisasi Islam Tingkat Pusat terdiri dari NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Matla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan *Al-Ittihadiyah. Ibid.*

kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan mu`amalat, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhoi Allah SWT. Sedangkan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah:

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu`ama dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif.
2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu`ama dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam dan menggalang ukhuwa islamiyah.
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Dengan fungsinya sebagaimana telah disebutkan di atas, maka orientasi MUI dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. *D niyah.*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena

islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

2. *Irs diyah.*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *dakwah wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahyi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu beerdimensi dakwah.

3. *Ij biyah.*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *ijabiyah* yang senang tiasa memberikan jawapan positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa-prakarsa kebijakan (amal Saleh) dala semangat berlomba dan jebaikan (*fastabiq al-khair t*).

4. *Huirriyah.*

Majelis ulama indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan mardeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5. *Ta`awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan

dalam membela kaum dhu`afah untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan masyarakat golongan umat Islam. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*Ukhuwah wataniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwa basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

6. *Syuriyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis akomodiatatif dan asfiritif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7. *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senangtiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

8. *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa-prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas-ormas.

9. *Addualiyah*.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/ organisasi islam internasional di berbagai negara.

Peran MUI sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan maslah-masalah keagamaan yang masih samar adalah sebagai berikut⁴:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*Warasat al-Anbiy*)
2. Sebagai pemberi fatwa
3. Sebagai pembimbing dan pelayanan ummat (*Ri-ayat wa khadim al-ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa at-Tajdid*
5. Sebagai penegak *Amar Makruf Nahyi Munkar*

⁴ “Orientasi dan Peran MUI”, http://www.majelisulama.com/mui_in/about.php?, akses 19 Juli 2012.

Dalam setiap organisasi mempunyai susunan organisasi. Adapun susunan organisasi Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia pada bab V pasal 17 mengenai susunan dan hubungan organisasi Majelis Ulama Indonesia bahwa Majelis Ulama Indonesia pusat berkedudukan di Ibukota Negara RI, majelis Ulama Indonesia Provinsi bertempat di Ibukota Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota bertempat di Ibukota Kabupaten/Kota dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan bertempat di Ibukota Kecamatan.⁵

Pada pasal 18 muqadimah pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktual administratif, sedangkan hubungan Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi atau kelembagaan islam bersifat konsultatif dan kemitraan.⁶

Adapun pada bab VI pasal 19 tentang susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia pusat dan Majelis Ulama Indonesai daerah adalah dewan penasehat, dewan pimpinan harian, dan anggota pleno, komisi dan lembaga.⁷

B. Komisi Fatwa

Komisi yang berperan dalam maslah-masalah ibadah dan mu`amalah adalah komisi fatwa, keberadaan komisi ini dinilai sangat

⁵“*Muqadimah Pedoman Dasar: Majelis Ulama Indonesia*”, http://www.majelisulama.com/mui_in/about.php?, akses 19 Juli 2012.

⁶ *Ibid*, h. 3.

⁷ *Ibid*.

penting, karena tugas tugas yang diemban oleh komisi fatwa ini tidaklah mudah, atau bisa dikatakan sangat sulit, karena dalam memfatwakan suatu persoalan hukum islam tanggung jawabnya bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT.

Tujuan dan arah dibentuknya komisi fatwa adalah untuk menelaah dan membahas suatu persoalan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk dicari pembedaannya menurut hukum pandangan Islam apakah persoalan itu sesuai ataukah berlainan dengan hukum Islam.

Adapun mekanisme kerja komisi fatwa sebagaimana yang tercantum dalam pendahuluan kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1997 mengenai mekanisme kerja fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-634/MUI/1997. Dijelaskan pada bagian pertama tentang penyelesaian masalah point (A) nomor 1 sampai 5 bahwa, dalam menyelesaikan masalah yang berisi fatwa, baik dari pemerintah maupun dari umat Islam, komisi fatwa menyeleksi terlebih dahulu masalah yang berisi permintaan fatwa, yang dilakukan oleh tim khusus untuk diidentifikasi, apakah masalah tersebut termasuk masalah yang layak untuk dibawa kedalam rapat komisi fatwa, masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI daerah tingkat 1, masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh tim khusus atau masalah tersebut tidak perlu diberi jawaban. Tim khusus disini terdiri ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur pengurus harian dan pengurus komisi fatwa MUI.

Untuk masalah yang layak dibawa kedalam rapat komisi fatwa dilaporkan kepada ketua komisi fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari tim khusus, setelah mendapat kepastian waktu, masalah tersebut dilaporkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan rapat. Sedangkan untuk masalah yang dikembalikan kepada MUI daerah tingkat 1 dilaporkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya.⁸

Persidangan-persidangan yang diadakan menurut keperluan atau apabila MUI telah diminta pendapatnya oleh umum atau permintaan mengenai soal-soal tertentu dalam hukum Islam.⁹

Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI, mengenai prosedur rapat dijelaskan bahwa dalam mengadakan rapat harus dihadiri oleh anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat, dimana yang dimaksud dengan anggota komisi adalah komisi fatwa berdasarkan penetapan dewan pimpinan. Untuk hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Rapat dipimpin oleh ketua dan wakil ketua wakil ketua komisi atas persetujuannya ketua komisi didampingi oleh sekretaris komisi, jika ketua dan wakil ketua komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota komisi yang disetujui. Selama rapat berlangsung sekretaris atau wakil sekretaris komisi mencatat usulan, saran, dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan risalah rapat dan

⁸ Ma'ruf Amin, dkk, *op.cit*, h. 961

⁹ Muhammad Atho Mudzahar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h, 79.

bahan keputusan fatwa komisi. Rapat keputusan ditetapkan setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komperhensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, setelah keputusan fatwa diputuskan diputuskan dalam keputusan komisi lalu dilaporkan kepada dewan pimpinan lalu agar dapat adap dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁰

C. Pandangan dan Metode Instinbat MUI mengenai Hukum Jual Beli Cacing.

1. Pandangan MUI mengenai Hukum Jual Beli Cacing.

Dalam memutuskan suatu fatwa MUI terlebih dahulu menimbang masalah yang dipertanyakan oleh masyarakat maupun pemerintah dengan melihat kondisi yang ada pada masyarakat, begitu juga keputusan fatwa mengenai makan dan budidaya cacing dan jangkrik, maka MUI terlebih dahulu menimbang bahwa budidaya cacing dan jangkrik kini banyak dilakukan oleh masyarakat, baik untuk pakan ternak, obat-obatan, kosmetik maupun kosumsi (dimakan orang), selain itu MUI juga memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang membudidayakan, makan dan memanfaatkan cacang dan

¹⁰ *Ibid.* h. 385.

jangkrik, karena masyarakat memerlukan penjelasan mengenai hukum membudidayakan, memakan, dan memanfaatkan cacing dan jangkrik.

Mengenai hukum jual beli cacing MUI memutuskan dalam fatwanya dengan nomor: kep-139/MUI/IV/2000 tentang makan dan budidaya cacing dan jangkrik, dijelaskan bahwa:¹¹

- a. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori *al-hasyar t*.
- b. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila dan Al-Auza`i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermamfaat dan tidak membahayakan; dan pendapat ulama (Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi`i) yang mengharamkan memakannya.
- c. Membudidayakan cacing untuk diambil mamfaatnya, seperti untuk dijual, atau untuk obat-obatan/kosmetik, tidak untuk dimakan, sama hukumnya dengan hukum memakannya (lihat point b)
- d. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri mamfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (Mubah).

Sebelum memutuskan fatwa mengenai makan dan budidaya cacing ini, MUI terlebih dahulu memperhatikan makalah “Budidaya cacing dan jangkrik dalam kajian fiqh,” yang di presentasikan oleh Dr.

¹¹ Ma`ruf Amin, dkk, *op.cit*, h. 635-638

KH. Ahmad Munif pada sidang komisi fatwa MUI. Dalam makalah tersebut menjelaskan bahwa hukum dari budidaya cacing itu adalah halal, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu; 1) menggunakan kaidah fiqh *al-Aslu fi al-Man fi' al-Ib hah*, 2), menggunakan pendekatan *maslaha mursalah (istisl h)*, dan 3), menggunakan pendekatan *maq sid asy-syari`ah*.

Selain memperhatikan makalah, MUI dalam memutuskan fatwa mengenai makan dan budidaya cacing dan jangkrik juga memperhatikan pandangan dan pendapat para ahli budidaya cacing dan jangkrik yang disampaikan pada sidang komisi fatwa, yang menyimpulkan bahwa cacing adalah bermamfaat dan tidak membahayakan. Selain itu, MUI juga memperhatikan mengenai pandangan dan pendapat peserta sidang komisi fatwa MUI

2. Metode Istinbat MUI Mengenai Hukum Jual Beli Cacing.

Adapun metode yang digunakan MUI dalam menetapkan suatu fatwa sebagaimana tercantum dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai dasar umum dan sifat fatwa (point 1), adalah bahwa MUI dalam menetapkan suatu fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (Had s), Ijm dan Qiy s. Dan sebelum fatwa ditetapkan MUI meninjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, dengan

cara seksama berikut dalil-dalilnya. Untuk masalah yang telah jelas hukumnya sebagaimana adanya.¹²

Untuk masalah yang terjadi khalafiyah di kalangan mazhab, maka MUI dalam menetapkan fatwa berdasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam`uwa at-taufiq*. Jika usaha penemuan titik temu berhasil, maka penetapan fatwa berdasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muq ranah al-mazahib* dengan menggunakan kaidah, kaidah *ushul fiqh muq ran*. MUI dalam menetapkan fatwa untuk masalah yang tidak ditemukan hukumnya di kalangan mazhab, berdasarkan hasil ijtihad *jam`i* (kolektif) dengan menggunakan metode *bay`ni, ta`lil (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istihlani dan sad az-zar`ah*. Kemaslahatan umum (*mas lih`ammh*) dan *maq sid asy-syari`ah* juga senantiasa diperhatikan oleh MUI dalam menetapkan suatu fatwa.¹³

Adapun metode istinbat MUI mengenai makan dan budidaya cacing dan jangkrik adalah sebagai berikut¹⁴:

a. Ayat-ayat al-Qur`an sebagai berikut:

Surat al-Baqarah (2): 29



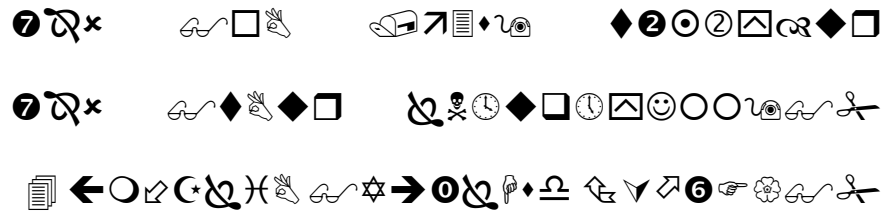
¹² Metode tersebut terdapat dalam bab III pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, mengenai metode penetapan fatwa pada poin 1 dan 2. Lihat Himpunan Fatwa, *op.cit*, h. 384.

¹³ Lihat bab III, metode penetapan Fatwa point 3(a dan b), 4 dan 5. *Ibid*, h. 385

¹⁴ Keputusan fatwa, *op.cit*, h. 1-3.

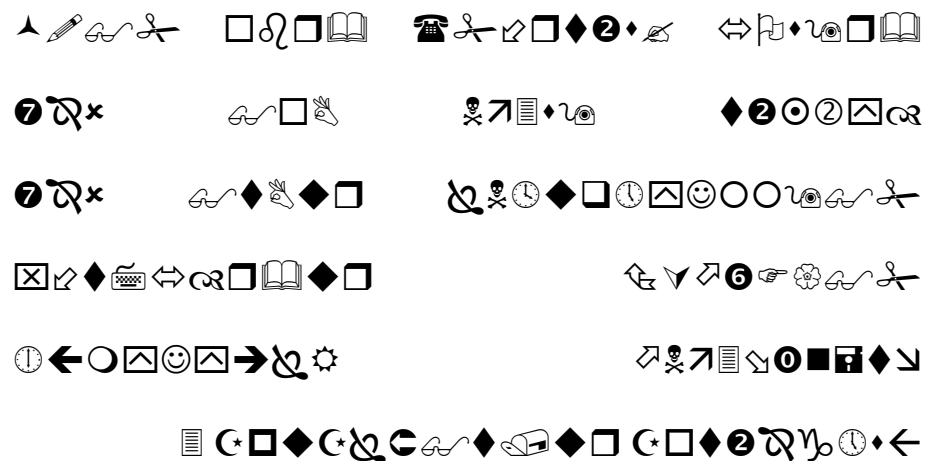
“Allahlah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk sekalian”

Surat al-Jasiyah (45): 13



“Allah menundukkan untukmu semua yang ada dilangit dan di bumi
(sebagai Rahmat) dari-Nya”

Surat Luqman (31): 20



“Tidaklah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah
menundukkan untukmu (kepetingan) apa yang ada dilangit dan apa
yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan
batin”

b. Hadist Nabi SAW:

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا

من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسي شيء

”Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur`an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya adalah haram, dan apap yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimamfaatkan. Maka, terimalah sesuatu apapun”

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها و حد حدودا فلا تعتدوها و حرم أشياء فلا

تنتهكوها و سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, janganlah kamu cari-cari hukumnya.”

أحلت لنا ميتتا و دمان: السمك و الجراد و الكبد و الطحال

“Dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan dua macam darah, bangkai ikan dan belalang, serta hati dan limpa”

c. Kaidah fiqh:

الأصل في المنافع الإباحة

“Pada dasarnya, segala sesuatu yang bermamfaat adalah halal/mubah”

أينما كانت المصلحة فثم حكم الله

“Dimana ada maslahat (mamfaat), disanalah hukum Allah”

d. Pendapat ulama tentang hukum *al-hasyar t*. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi`i berpendapat *al-hasyar t* hukumnya haram

sebab ia termasuk *al-Khab is*, sedangkan Imam Malik, Abi Laila dan al-Auza`i *al-hasyar t* hukumnya halal.

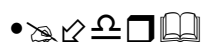
BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN DAN METODE ISTINBAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) MENGENAI HUKUM JUAL BELI CACING

A. Terhadap Pandangan MUI Mengenai Hukum Budidaya dan Jual Beli Cacing.

1. Alasan MUI Membolehkan Budidaya Cacing.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa permasalahan budidaya dan jual beli cacing merupakan permasalahan yang baru, yang tidak terdapat dalam nas yang membahasnya baik dalam al-Qur' n maupun dalam as-Sunnah (*maskut`anhu*). Untuk mengetahui hukum mengenai jual beli cacing tidaklah mudah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahui hukumnya, untuk itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang tidak tahu tersebut bertanya kepada yang berpengatahuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl (14): 43 :



“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”

Yang dimaksud dengan “orang yang berpengetahuan “ disini adalah para ulama yang ada dalam wadah Majelis Ulama Indonesia yang menjadi tempat bertanya bagi masyarakat atau pemerintah tentang masalah-masalah keagamaan, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang mu`amalah seperti masalah jual beli cacing.

Dalam keputusan fatwa MUI, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa “cacing termasuk kedalam kategori hewan *al-Hasyar t*¹. Dan “Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri mamfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh” dari pernyataan MUI terkesan membolehkan budidaya cacing dan mengharamkan jual beli cacing.

MUI tidak mengaramkan jual beli cacing, tetapi “mengakui” dua pendapat, yakni membolehkan dan mengharamkan. Alasan membolehkan jual beli cacing dengan melihat kepada pendapat ulama yang memakannya dengan merujuk kepada pendapat Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auza`i, dan mengharamkan jual beli cacing dengan merujuk kepada pendapat Imam asy-Syafi`i dan imam Abu Hanifah yang mengharamkan memakannya.

¹*Al-Hasyar t* terbagi kepada dua bagian yaitu hewan *al-Hasyar t* yang mempunyai sayap dan hewan *al-Hasyar t* yang tidak mempunyai sayap seperti cacing. Adapun ciri-ciri dari hewan *al-Hasyar t*, secara umum biasanya fisiknya kecil-kecil, ada yang darahnya mengalir, dan ada yang darahnya tidak mengalir. Lihat Ahmad Munif, “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh,” makalah disampaikan pada sidang komisi Fatwa MUI, diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, 11 dan 25 september 1999, h. 6.

Adapun alasan MUI membolehkan budidaya cacing adalah dengan memperhatikan tentang “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh,” “Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh,” yang dipersentasikan oleh Dr. KH. Ahmad Munif pada sidang komisi fatwa MUI yang menjelaskan bahwa budidaya cacing hukumnya mubah (boleh) dengan menggunakan tiga peningkatan fiqh yaitu *al-aslu fi al-man fi’ al-ibaha*, *masalah mursala/istislah*, dan *maqasid asy-syari’ah*. Selain memperhatikan makalah tentang “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh”, MUI juga memperhatikan pendapat para ahli budidaya cacing yang menyatakan cacing itu bermamfaat dan tidak membahayakan. Di dalam makalah tentang “Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh”, dijelaskan bahwa budidaya cacing termasuk permasalahan baru dalam hukum islam yang tidak ditegaskan hukumnya dalam nas, baik dalam al-Qur`an maupun as-Sunnah atau dalam istilah *Usul fiqh* sering disebut dengan *maskut`anhu*. Untuk permasalahan yang termasuk kealam kategorimasku`anhu khususnya budidaya cacing ini, terdapat tiga macam pendekatan untuk mengetahui hukumnya yaitu:

- a. Dengan menggunakan kaidah

الأصل في المنافع الإباحة

“Pada dasarnya, segala sesuatu yang bermamfaat adalah mubah/halal”

Kaidah di atas bersumber dari al-Qur`an

[illegible]

人 铅笔 眼镜 剪刀 方框 铃 方框 书 电话 剪刀 信封 方框 菱形 2 加号 剪刀 双向箭头 手 铃 方框 书
 7 刀 x 眼镜 方框 手 骷髅 刀 信封 铃 菱形 2 同心圆 方框 心
 7 刀 x 眼镜 菱形 手 菱形 方框 刀 骷髅 时钟 菱形 方框 时钟 方框 笑脸 同心圆 同心圆 铃 眼镜 剪刀
 方框 信封 菱形 信封 双向箭头 心 方框 书 菱形 方框 信封 刀 刀 6 手 花 眼镜 剪刀
 月亮 方框 菱形 2 刀 手 时钟 加号 左箭头 时钟 左箭头 同心圆 方框 笑脸 方框 右箭头 刀 太阳 刀 骷髅 刀 信封 刀 0 方框 问 菱形 刀
 书 月亮 方框 菱形 月亮 刀 月亮 眼镜 菱形 手 方框 菱形 方框

Wajah istidl 11, metode pengambilan dalil ketiga ayat diatas adalah bahwa semua yang dala dimuka bumi dan di langit itu diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan umat manusia. Ini berarti semuanya itu halal bagi umat manusia, kecuali bila membahayakan atau ada nas yang menyatakan keharamannya.

Ada beberapa hal yang disengaja tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah. Tidak dinyatakan halal, dan tidak dinyatakan pula haram. Hal ini bukan karena Allah lupa (sebab Allah memang tidak pernah lupa), tetapi karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak ditegaskan halal atau haram itu hukumnya boleh, tentu selama bermamfaat dan tidak membahayakan. Maka sesuai dengan kaidah *al-Aslu fi al Man fi' al-Ibahah* menurut pendapat bapak Ahmad Munif budidaya cacing itu hukumnya halal/mubah.

b. Menggunakan pendekatan *Maslahah mursalah/istislah*.

Dalam menganggapi masalah yang tidak ada penegasan hukumnya dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma' serta tidak dapat diselesaikan dengan qiyas, al-Gazali selaku tokoh usuliyin mazhab Syafi'i, Imam Malik, dan mayoritas ashabnya serta mayoritas mazhab Hanbali berpendapat bahwa masalah semacam ini dapat diselesaikan melalui metodologi *istislah* atau berdasarkan *maslahah mursalah*.

Budidaya cacing jelas merupakan *maslahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil tertentu baik dari al-Qur'an maupun Sunnah yang membenarkan atau membatakannya. Hasil budidaya cacing tersebut bermamfaat untuk menyuburkan tanah, mengatasi masalah sampah, untuk digunakan sebagai kosmetik dan obat-obatan yang bersifat ekonomis.

c. Menggunakan pendekatan *maq sid syari'ah*

Hukum budidaya cacing dengan menggunakan pendekatan *maq sid syari`ah*, dalam makalah ini dijelaskan dengan menggunakan prinsip yang populer dikalangan ulama.

أينما كانت المصلحة فثم حكم الله

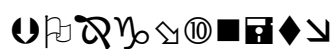
Maksud dari prinsip diatas adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum islam. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa budidaya cacing dan jangkrik merupakan maslahat, dan maslahat itu tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip umum tujuan pensyari`atan hukum islam. Menurut hemat penulis makalah ini, Bapak Ahmad Munif hal ini justru sejalan, sebagaimana diketahui, tujuan umum pensyari`atan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan/bencana. Hal ini direalisasikan dengan memelihara lima hal menjadi kebutuhan primer hidup dan kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan/keturunan.

Menurut Bapak Ahmad Munif, budidaya cacing dan jangkrik sebagai upaya upaya mencari *ma`isyah* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah maslahat/kemaslahatan yang berhubungan dengan upaya memelihara harta yang juga bersinggungan dengan kebutuhan primer yang lain yakni agama, akal, jiwa dan kehormatan/keturunan. Sebab dengan budidaya diharapkan dapat diperoleh sumber penghasilan/uang. Dengan uang yang memadaidiharapkan dapat mencukupi kebutuhan hidup seseorang dengan baik. Dengan tercukupi kebutuhan hidupnya dengan

baik, akan sehat fisiknya, terpelihara jiwanya, sehat akalanya, terpelihara kehormatan/keturunan dan agamanya.

2. Alasan MUI mengharamkan jual beli cacing.

Dan alasan MUI mengharamkan jual beli cacing adalah MUI juga memperhatikan makalah bapak Ahmad Munif tentang “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh”, yang dalam makalah tersebut dijelaskan bahwa cacing termasuk kategori *binatang al-hasyarat* dan terdapat perbedaan pendapat diantara ulama mazhab mengenai hukum *binatang al-hasyarat*. a) pendapat imam Abu Hanifah dan imam asy-Syafi`i² yang berpendapat bahwa *al-hasyarat* hukumnya haram, dan b) pendapat imam Malik, Ibn Abi Laila dan al-Auza`i yang berpendapat bahwa *al-hasyarat* itu hukumnya boleh. Adapun alasan imam Abu Hanifah dan imam asy-Syafi`i mengharamkan *al-hasyarat* adalah karena *al-hasyarat* termasuk binatang yang menjijikkan (*al-khabais*) dengan berpegangan kepada dalil surat al-A`raf (9): 157



“dan Allah telah mengharamkan (memakan) bagi mereka segala yang buruk”

²Salah satu syarat jual beli menurut imam asy-Syafi`i adalah barang yang dipejualbelikan dapat dimanfaatkan menurut syara`, sedangkan *al-hasyarat* menurut imam syafi`i selain termasuk binatang yang *khabais* juga *al-hasyarat* termasuk binatang yang tidak bermamfaat, oleh karena itu imam Syafi`i mengharamkan jual beli *al-hasyarat*. Lihat Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), IV:392. Lihat juga Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `Ala Mazahib al-`Arba`a*, (Beirut: Dar al_kutub al-Ilmiyah: t.t), II: 150.

3. Terhadap pandangan MUI mengenai hukum budidaya dan jual beli cacing.

Salah satu yang menyebabkan jual beli menjadi sah adalah barang yang diperjual belikan memenuhi standart yang telah ditentukan oleh syara` yakni dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam jual beli, adapun rukun-rukun dan syarat tersebut adalah;

- a. Pelaku akad (*qid*).
- b. Shigat (*Ijab* dan *Qabul*)
- c. Barang yang diperjual belikan (*Ma`qud `Alaih*)

Dari rukun jual yang telah disebutkan di atas, maka cacing termasuk kedalam kategori binatang yang diperjualbelikan (*ma`qud `alaih*). Adapun syarat-syarat dari *ma`qud `alaih* adalah;

1) Barangnya suci.

Yang dimaksud dengan barangnya suci menurut jumhur ulama adalah barang yang diperjual belikan bukanlah kategori barang najis, sebagaimana dijelaskan dalam hadist;

إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة و الخنزير والأصنام فقل يا رسول الله
 أ رأيت شحوم الميتة فأنتها تطلّى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟
 فقال لا، هو حرام ثم قال رسول الله ص.م عند ذلك: قتل اليهود إن الله لما حرم
 شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung (berhala). Sahabat bertanya “Ya Rasulullah bagaimana pandangan tuan tentang mamfaat lemak (gemuk), bangkai yang berguna untuk cat perahu, minyak kulit, dan minyak lampu? Rasulullah SAW menjawab, “Allah membunuh yahudi karena diharamkan atas mereka minyak (bangkai), kemudian mereka menjualnya kemudian mengkonsumsi hasil (harga penjualan)”.³

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT mengharamkan jual beli najis seperti khamar, bangkai, dan babi karena didalamnya banyak mengandung mudharat dibandingkan dengan mamfaatnya, dan untuk menjadi barang yang disembah dan itu akan menjadikan musyrik.

Walaupun cacing termasuk kategori binatang *al-khabais*, tetapi cacing banyak sekali mamfaatnya dibandingkan dengan mudharatnya, seperti untuk pakan makan hias, ikan kolam, pakan ternak, pupuk tanaman, pengolah limbah dan memperbaiki struktur tanah, berbeda dengan khamar, bangkai dan babi yang lebih banyak mengandung mudharatnya. Sebagaimana pendapat mazhab Hanafi dan Zahiri yang membolehkan jual beli barang najis yang dapat dimanfaatkan seperti jual beli barang najis yang

³ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, ttp, Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), III : 43, “Kitab al-Buyu”, “Bab Bai’ al-Maitah wa al-Asnam”

dapat dimanfaatkan seperti jual beli kotoran hewan untuk keperluan perkebunan yang digunakan sebagai pupuk tanaman.

2) Bermamfaat menurut syara`

Yang dimaksud dengan bermamfaat menurut syara` adalah barang yang diperjualbelikan bermamfaat menurut pandangan hukum islam. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi;

يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب

“Penjualan setiap (benda) najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk di makan dan di minum adalah boleh”⁴

Dalam hal ini jual beli cacing juag bermamfaat, karena dengan adanya jual beli cacing dapat mengatasi pengangguran yakni dengan adanya lapang kerja baru, dimana jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, maka jual beli cacing ini dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagaimana terkandung dalam azas-azas *mu`amalah* yaitu bahwa *mu`amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan mamfaat dan menghindari mudharat dalam hidup manusia.

Dari syarat-syarat *ma`qud `alaih* di atas, menurut hemat penyusun menjualbelikan cacing hukumnya boleh (*mubah*) selama tidak untuk dimakan, meskipun cacing termasuk binatang *al-*

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III: 129

hasyarat dan menjijikkan bagi sebagian masyarakat, tetapi sebenarnya cacing memiliki banyak sekali mamfaatnya bagi manusia seperti untuk pengelolah limbah, menyuburkan lahan pertanian, memperbaiki dan mempertahankan sturktur tanah, meningkatkan daya serap air ke permukaan dan menjadi bahan makanan untuk ikan hias, ikan kolam dan pakan ternak. Walaupun mazhab Hanafi mengharamkan binatang *al-hasyarat*, tetapi sebenarnya yang diharamkan adalah memakannya saja, dan untuk diperjual belikan hukumnya boleh selama bermamfaat, sebagaimana mazhab Hanafi membolehkan jualbeli barang najis seperti jual beli kotoran hewan untuk dijadikan pupuk.⁵ Selain itu jual beli cacing juga merupakan permasalahan yang baru dalam bidang *mu`amalah*, dan salah satu azaz *mu`amalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur`an dan Hadist. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتي يدل الدليل علي التحريم

“Asal hukum dari segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁶

Kaidah diatas sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 29

⁵ Mengenai jual beli benda-benda najis, selain *khamar*, bangkai babi dan berhala, mazhab Hanafi dan Zahiriyah membolehkan selama benda najis itu bermamfaat dan tidak untuk dimakan. Lihat As-Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Mesir: Dar al-Fath lil Γam al-`araby, 1410H/1990M), III: 203

⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, t,t), h. 42



“Allahlah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu
sekalian”

Dan juga Hadist Rasulullah SAW, yaitu:

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو
فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسي شيئا

“Apa-apa yang di halalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya (al-
Qur`an) adalah halal, apa-apa yang diharamkanNya, hukumnya
haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/ tidaklah ada kejelasan
hukumnya, dimamfaatkan. Untuk itu terimalah pemamfaatanNya,
sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apapun”⁷

Dalam hadist tersebut terdapat tiga ketentuan, yaitu; pertama,
sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya adalah
halal. Kedua, sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT
melahirkan hukum haram, dan ketiga, sesuatu yang didiamkan
(tidak dihalalkan dan tidak diharamkan), maka melahirkan hukum
mubah.⁸ Yusuf al-Qaradawi juga menjelaskan, bahwa arena
haram dalam islam sangat sempit sekali dan arena halal justru
sangat luas, karena nas-nas yang sahih dan tegas dalam hal haram

⁷ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Abu Dawud Sulaiman ibn Asy-as,
ttp: Dar al-Fikr, t,t), III, 366, “Kitab al-Ath‘imah”, “Bab Ma Lam Yazkur Tahrimuhu”.

⁸ Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Perternakan*, Bandung:
Pustaka Setia Bandung, 2003), h. 50.

jumlahnya sangat minim sekali, sedangkan untuk masalah yang tidak ada ketentuan halal dan haramnya adalah kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk kedalam kategori yang bolehkan Allah SWT.⁹

Sebenarnya jika diperhatikan bahwa hubungan antara jual beli cacing dengan budidaya cacing mempunyai keterkaitan yang sangat erat, karena dalam membudidayakan cacing pasti membutuhkan biaya untuk pemeliharaannya, dan budidaya cacing bagi masyarakat Indonesia merupakan suatu peluang usaha yang menguntungkan, dimana pakan ternak yang terbuat dari cacing lebih banyak yang membutuhkan dibandingkan pakan ternak yang terbuat dari ikan.

B. Terhadap Metode Istimbat MUI Mengenai Hukum Jual Beli Cacing.

Dalam hukum islam terdapat permasalahan yang telah jelas status hukumnya dalam al-Qur`an dan as-Sunnah (*manshus*), dan ada juga yang tidak ditegaskan dalam al-Qur`an dan as-Sunnah (*maskut`anhu*). Untuk permasalahan yang telah jelas status hukumnya dalam al-Qur`an dan as-Sunnah, tidak berlaku dan tidak dilakukan ijtihad, sedangkan untuk permasalahan yang tidak jelas status hukumnya dalam al-Qur`an dan as-Sunnah, maka diperlakukan ijtihad.

⁹ Muhammad Yusuf al-Qaradawi, *Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, ahli bahasa H. Mu`ammah Hamidi (ttp: Bina Ilmu, 1993), h. 14.

Di Indonesia, MUI merupakan wadah para ulama untuk berijtihad mengenai permasalahan-permasalahan agama, baik permasalahan yang berkaitan dengan *aqidah* maupun permasalahan yang berkaitan dengan *mu`amalah*. Dasar yang digunakan oleh MUI dalam berijtihad atau menetapkan fatwa adalah al-Qu`an dan as-Sunnah (hadist), *ijma`* dan *qiyas*.

Pemasalah budidaya dan jual beli cacing merupakan permasalahan yang baru yang tidak terdapat statusnya dalam al-Qu`an dan as-Sunnah, maka diperlukan ijtihad yang dilakukan oleh MUI, melalui fatwa yang dikeluarkannya merupakan suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum islam dalam menjawab tantangan modernitas, fatwa yang ditempuh MUI itu sendiri merupakan hasil ijtihad para pakar yang mampu menggali syariat islam secara cepat dan tepat.

Metode *istinbat* yang digunakan oleh MUI dalam membolehkan jual beli cacing adalah dengan merujuk kepada pendapat imam Malik, Ibn Abi Lailah dan al-Auza`i yang menghalalkan memakan binatang *al-hasyarat* dan juga menggunakan metode *ijtihad istislahi* yaitu suatu proses dari bentuk ijtihad yang meletakkan hukum-hukum syar`iyah untuk menjawab peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tidak terdapat dalam nas dengan menggunakan daya fikir yang disandarkan atau *istislah*.

Adapun pengertian *istislah* adalah;

تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها و لا اجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسله
أى مطلقة

“Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya atau tidak ada ijma terhadapnya, dengan berdasarkan kepada kemaslahatannya semata (yang oleh syara` tidak dijelaskan ataupun dilarang)”¹⁰

Yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* adalah maslahat yang tidak disebutkan oleh nas baik penolakannya maupun pengakuannya.¹¹ Pengertian ini sejalan dengan yang didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syar`i tidak mensyi`arkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.¹²

MUI menggunakan metode ini dalam membolehkan jual beli cacing, karena jual beli cacing ini merupakan permasalahan yang baru yang tidak terdapat status hukumnya dalam al-Qu`an dan as-

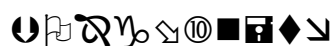
¹⁰ Zarkasji Abbdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 1994), Cet ke-2, h. 116

¹¹ Romli SA, *Muqarobaha Mazahibfil ushul*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 1999), h. 164.

¹² Abdul Wahab Khallaf , *Ilmu Usul al-Fiqh*, (ttp; Dar al-Kuwaitiyah, 1388H/1968M), h. 85

Sunnah, walaupun dalam surat keputusan fatwa, MUI menggunakan dalil-dalil dari al-Qur`an dan as-Sunnah, akan tetapi dalil-dalil tersebut tidak secara khusus menjelaskan mengenai hukum dari budidaya ataupun jual beli cacing tersebut. Selain dalil-dalil al-Qur`an dan as-Sunnah MUI juga menggunakan kaidah-kaidah umum seperti “*al-aslu fi al-munafiq al-ibaha*”, dan “*ainama kanati al-masalahatu fasamma hukmullah*”.

Sedangkan metode *istinbat* yang digunakan MUI dalam melarang atau mengharamkan jual beli cacing, dengan mengikuti pendapat imam asy-Syafi`i dan imam Abu Hanifah yang mengharamkan memakan binatang *al-Hasyarat*, karena binatang *al-Hasyarat* termasuk binatang yang menjijikkan (*al-khabais*) dengan berpegang pada surat al-A`raf (9): 157



“dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

Selain mengikuti pendapat imam asy-Syafi`i dan imam Abu Hanifah yang mengharamkan memakan binatang *al-hasyarat*, jika diperhatikan sebenarnya MUI dalam menetapkan keharaman jual beli cacing juga menggunakan metode *ta`lili* yakni dengan menggunakan *qiyas*, dimana pokoknya (*al-asl* atau *maqis `alaih*) adalah dengan merujuk kepada ayat *wa yuharrimu `alaihim al-*

khabais, sedangkan jual beli cacing merupakan hal yang baru yang tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur`an maupun dalam as-Sunnah, dan `illat dari cacing ini bahwa cacing merupakan binatang yang menjijikkan (*al-khabais*), dan dari ayat di atas jelas bahwa hukum dari benda yang menjijikkan adalah haram.

Sebagai lembaga keagamaan yang berperan sebagai pemberi fatwa, MUI menyadari bahwa dalam menetapkan fatwa terhadap permasalahan baru seperti budidaya cacing dan jangkrik ini, sangat suli jika hanya tertuju pada satu ulama saja, karena di dalam MUI sendiri terdapat berbagai organisasi keagamaan yang mempunyai pendapat berbeda-beda, oleh karena itu MUI dalam menetapkan fatwa menggunakan ijtihad *jama`i*, agar pendapat yang berlainan akan semakin dapat didamaikan, walaupun memang untuk sama-sama persis dalam satu persepsi adalah tidak mudah. Sebagaimana yang dituturkan oleh bahwa idealnya fatwa tidak memberi ruang dua pendapat, MUI melakukan hal ini karena di masyarakat banyak terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) dan sulit untuk dikompromikan, maka fatwa MUI mengenai budidaya cacing dan jangkrik ini bersifat *tardiji*, yakni terhadap putusan yang diakui dua pendapat, pendapat dari mazhab-mazhab yang berlainan dapat diakomodir, jika ada pertanyaan lagi dari

masyarakat, maka MUI bersifat “mengakui” seperti fatwa mengenai riba bunga.

Dari penuturan tersebut, penyusun berpendapat bahwa MUI dalam memutuskan fatwa mengenai hukum budidaya dan jual beli cacing menggunakan metode *muq ranah*¹³*al-mazahib*. Melakukan *muq ranah* terhadap usul mazhab dengan perbedaannya masing-masing, dimaksudkan untuk melihat titik perbedaan cara melakukan istinbat, yang tidak jarang melahirkan produk hukum yang berbeda pula.

Menelaah berbagai metode atau teori yang digunakan oleh mazhab hukum dalam melakukan istinbat dan sekaligus melakukan *muq ranah* (perbandingan) diantara metode yang berbeda merupakan hal yang amat penting dan tidak bisa diabaikan, sebab dengan terdapatnya keragaman metode yang digunakan dalam istinbat hukum, maka melahirkan berbagai implikasi yang luas terhadap hukum Islam itu sendiri.

¹³ Kata *muq ranah* berasal dari kata kerja *q rana* yang artinya membandingkan, dan kata *muq ranah* sendiri kata yang menunjukkan keadaan atau hal yang berarti membandingkan atau perbandingan. Lihat Romli, SA, *muq ranah mazahib fil ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 7

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dimuka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan MUI membolehkan budidaya cacing adalah dengan memperhatikan makalah “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh” dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu kaidah *al-aslu fi al manafi` al-ibahah, maslahah mursalah*, dan *maqosid syari`ah*. Dan alasan MUI mengharamkan jual beli cacing juga dengan memperhatikan makalah yang sama, dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan jual beli cacing juga dengan memperhatikan makalah yang sama, dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan binatang *al-hasyarat*.
2. Adapun metode istinbat yang digunakan MUI untuk menghalalkan jual beli cacing dengan menggunakan metode *istislah/maslahah mursalah*, dan metode istinbat yang digunakan MUI untuk mengharamkan jual beli cacing adalah dengan merujuk kepada pendapat ulama yang

mengharamkan memakan binatang *al-hasyarat* dan juga menggunakan metode *qiyas*.

B. Saran-Saran

1. Diharapka MUI dalam memutuskan suatu fatwa yang tegas tanpa membingungkan masyarakat.
2. MUI lebih berperan aktif untuk mensosialisasikan hasil dari keputusan fatwanya, agar masyarakat mengetahui secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, Zarkasji, Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, cet.ke 2, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 1994.
- Abi Bakar, al-Imam Taqiy ad-Din, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Asqalani, Ibn Hajar al-, *Buluq al-Mar m min Adillah al-Ahk am*, Riyadh: Maktabah Dar as-Salam, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet.ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Brotowidjoyo, Mukayat Djarubito, *Zoologi Dasar*, cet.ke-3, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Bukhari, Abu `Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, ttp: Dar al-Fikr, 1981M/1401H.
- Dawud, Abi, *Sunan Abi Dawud*, 2 Jilid, ttp: dar al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek pengadaan kitab suci Al-Qur`an, Departemen Agama RI, Pelita V, 1986/1987.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet.ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *I'l mul Muw qi'in 'an Rabb al-' lamin*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1955.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir al-, *Pola Hidup Muslim (Minhajatul Muslim) Muamalah*, ahli bahasa H. Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, cet.ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- _____, *Kit b al-Fiqh 'Al al-Maz hib al-Arba`ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, t.t.
- Kamal, Musthafa dkk, *Fikih Islam*, cet.ke-2, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp: Dar al-Kuwaitiyah, 1388H/1968M.
- Lubis, Surahwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mahpi, *Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Mubarok, Jaih, *Fiqh Kontemporer dalam Bidang Peternakan*, cet.ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2003.

_____, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

Munawwir, Ahmad Marsun, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Penadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan P.P. al-Munawwir, 1994.

Munif, Ahmad, *Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh*, Makalah disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa MUI, Jakarta 11-25 September 1999.

Palungkun, Rony, *Sukses Berternak Cacing Tanah Lumbricus Rubellus*, cet.ke-5, Bogor: PT. Penebar Swadaya 1999.

Peter Salim, Yunni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Press, 1991.

Poedjiadi, Anna, *Dasar-Dasar Biokimia*, cet.ke-1, Jakarta: UI Press, 1994.

Pratiwi, DA dkk, *Buku Penuntun Biologi SMA untuk kelas X*, Jakarta: Erlangga, 2004

Qaradawi, Muhammad Yusuf al-, *Halal Wa al-Haram fi al-Islam*, ahli Bahasa H. Muammah Hamidi, ttp: Bina Ilmu, 1993.

Rahman, Asjmun A, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawaid Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, tt.

Rismunandar, *Tanah Seluk Beluknya Bagi Pertanian*, cet.ke-5, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993.

Rukmana, Rahmat, *Budidaya Cacing Tanah*, cet.ke-5, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999

SA, Romli, *Muq ranah Maz hib fil Ushul*, cet.ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Mesir: Dar al-Fath lil 'Ilam al-'araby, 1410H/1990M.

Sajuthi, Dondin dkk, *Ekstrak Natipertik Ekstrak Cacing Tanah*, Artikel diakses pada 6 Juni 2012 dari { Internet File: <http://www.kompas.com/ilmupengetahuan/indeks.htm> }

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2002

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet.ke-1, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Umar, Muin dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: tnp, 1985.

Yatim, Wildan, *Kamus Biologi*, cet.ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Zeily Nurachman, *Cacing Tanah Mengolah Lingkungan yang Tercemar*, Harian Kompas, 7 April 2012.

Zuhaili, Wahbah Az, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, 9 Jilid, Kairo: Dar al-Fikr 1989.

_____, *Atasi Polusi dengan Biaya Murah*, Harian Kompas, 7 April 2012.

_____, *Budidaya Cacing Tanah (*Lumbricus sp*)*, Artikel diakses pada 22 Mei 2012 dari { Internet file: http://www.iptek.net.id/budidaya_peternakan.php. }

_____, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.

_____, *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000. Tentang makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik*, diakses pada 14 September 2012 dari { Internet File: http://www.mui.or.id/far_cacing.htm, }

_____, *Majelis Ulama Indonesia Berdiri Tumbang dan Berkembang*, diakses pada 19 Juli 2012 pada { Internet File: http://www.majelisulama.com/mui_in/article.php }

_____, *Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia*, diakses pada 19 Juli 2012 pada { Internet File: http://www.majelisulama.com/mui_in/article.php }

_____, *Orientasi dan Peran Majelis Ulama Indonesia*, diakses
pada 19 Juli 2012 pada { Internet File:
http://www.majelisulama.com/mui_in/article.php }